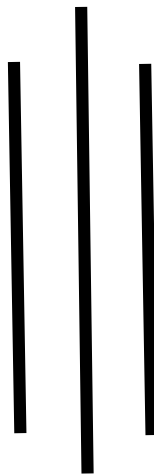


**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2015**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu siklus perencanaan yang berkelanjutan (*sustainable*), RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2014. Penyusunan RKPD Tahun 2015 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Proses penyusunan RKPD Tahun 2015 diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tahun 2014 yang berpedoman pada Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2013 Nomor 050/02/978, perihal Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015 dan penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2014. Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan partisipatif. Hasil kegiatan pelaksanaan Musrenbang menjadi dasar penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2015, untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RKPD Tahun 2015 menjadi dasar perumusan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2015, penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2015. KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dibahas oleh Bupati bersama DPRD untuk disepakati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah, Bupati bersama DPRD menindaklanjuti program dan kegiatan yang telah disepakati dalam forum Musrenbang RKPD ke dalam KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2015 disusun didasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;

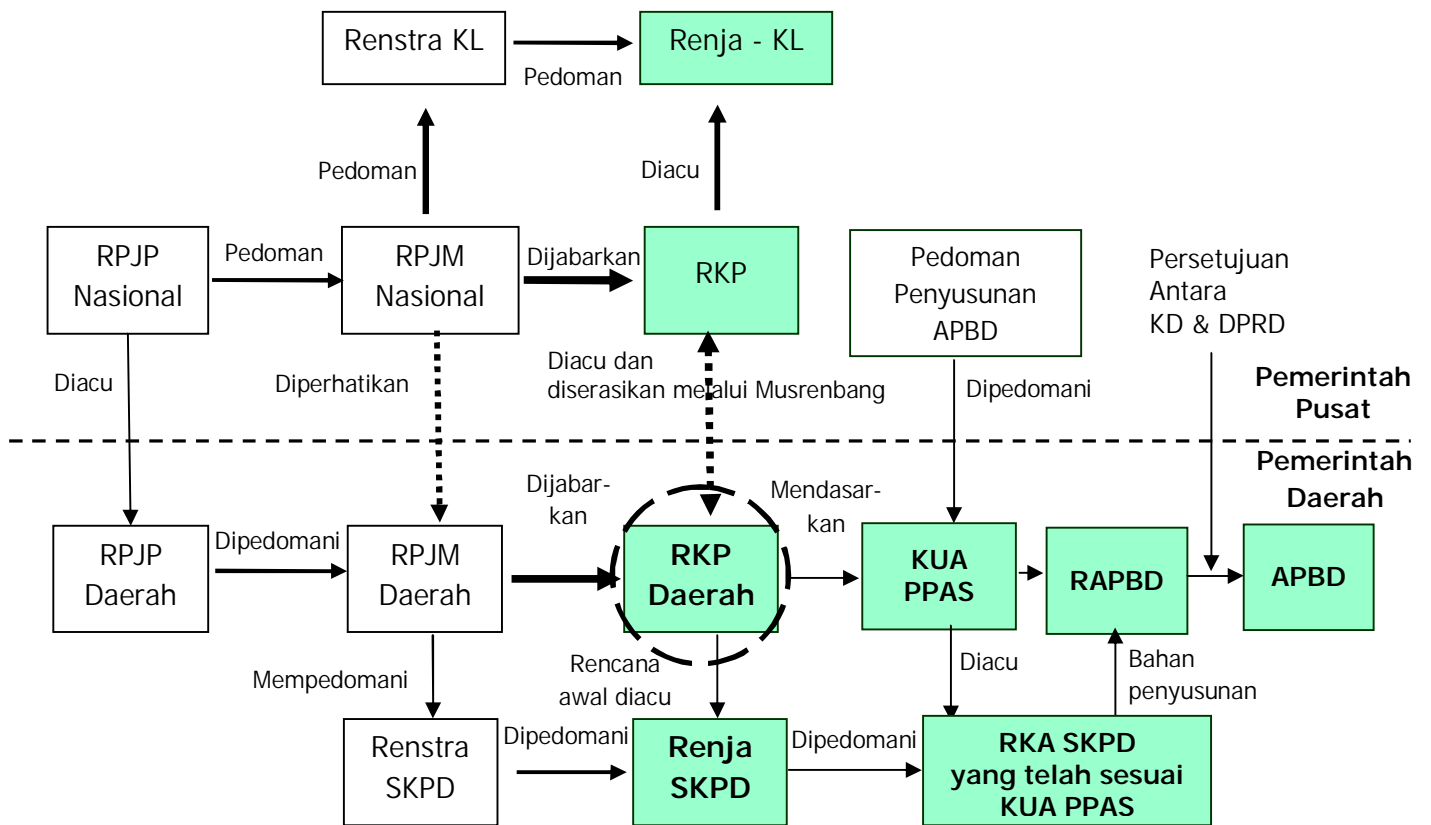
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran/tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJMD dijabarkan kedalam perencanaan pembangunan tahunan, yaitu RKPD dengan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD dipakai sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD. RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD yang disusun mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD. Rancangan Renja SKPD setelah disahkan dengan Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala SKPD menjadi Renja SKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA SKPD yang telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1
Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan keterkaitan RKPD sebagai penjabaran RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD sampai dengan penganggaran di dalam RAPBD dalam suatu alur mekanisme perencanaan.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

1.5 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana.

BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan potensi dan kecenderungan daerah dari aspek geografi, demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. Mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD.
2.3	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Memuat rumusan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang agenda kerja DPRD tahun 2015.
2.4	Permasalahan Pembangunan Daerah Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2013 dan tahun 2014, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan 2016.
3.2	Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah Menjelaskan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mengemukakan Visi dan Misi serta sasaran pembangunan daerah yang merupakan sasaran pembangunan lima tahunan.
4.2	Prioritas Pembangunan Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dikaitkan dengan program yang merupakan jawaban permasalahan pada tahun rencana.
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan perencanaan program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD.
BAB VI	PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD ini adalah :

- a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2015 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya.
- b. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah (kecamatan), antar kewenangan urusan pembangunan, antar SKPD dan antar struktur pemerintahan.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada dalam rangka pembangunan daerah.
- d. Menyelaraskan pencapaian sasaran, dan prioritas program pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya RKPD Tahun 2015 adalah untuk memberikan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Adapun wilayah administratifnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 123 desa dan 9 kelurahan. Adapun penjabaran mengenai luas wilayah, banyaknya desa, kelurahan, dukuh, RT dan RW dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
 Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi
 Kabupaten Kudus Tahun 2013

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Desa	Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1	Kaliwungu	3.271	15	0	48	67	442
2	Kota	1.047	16	9	60	111	496
3	Jati	2.630	14	0	51	79	381
4	Undaan	7.177	16	0	31	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	32	69	341
6	Jekulo	8.292	12	0	45	85	443
7	Bae	2.332	10	0	38	51	285
8	Gebog	5.506	11	0	44	82	435
9	Dawe	8.584	18	0	85	109	581
Jumlah		42.516	123	9	434	716	3.761

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2013

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Kudus terletak antara 06°48'37" - 06°51'55" Lintang Selatan dan 110°47'42" - 110°53'05" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Kudus juga terletak pada jalur perekonomian nasional yaitu dilewati jalan nasional pantura sehingga sangat strategis. Kondisi wilayah Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berdekatan dengan pesisir Kabupaten Demak, Jepara dan

Kabupaten Pati serta sebagian di bagian Utara merupakan pegunungan Muria dan Pati Ayam.

3. Topografi

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah yang berkisar antara 5-1.600 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah, yaitu 5 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Kudus memiliki kelerengan yang bervariasi, yaitu:

1. Kelerengan 0 – 8 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief datar. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Bae.

2. Kelerengan 8 – 15 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief landai. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo.

3. Kelerengan 15 – 25 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam bagian Timur.

4. Kelerengan 25 – 45 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief berbukit kecil dan curam. Kelerengan ini terdapat di daerah Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo.

5. Kelerengan > 45 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog.

4. Geologi

Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dataran rendah, perbukitan sampai

pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di daerah Kabupaten Kudus dan penyebarannya :

- a. Jenis tanah andosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- b. Jenis tanah grumosol mediteran, tersebar di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- c. Jenis tanah latosol merah, penyebarannya meliputi Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- d. Jenis tanah planosol coklat, penyebarannya di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Jekulo.
- e. Jenis tanah latosol coklat, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- f. Jenis tanah litosol grumosol, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- g. Jenis tanah mediteran, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Bae, Kecamatan Kota, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati dan Kecamatan Kaliwungu.
- h. Jenis tanah aluvial coklat, tersebar di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo dan dan Kecamatan Kaliwungu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Kudus, maka dapat diinventarisasi beberapa potensi bahan galian golongan C yang terdapat di Kabupaten Kudus, yaitu:

- a. Andesit-pasir

Penyebaran bahan galian andesit-pasir di daerah Kabupaten Kudus menempati daerah perbukitan yang menempati kaki lereng Gunung Muria. Breksi tuff ini dijumpai di Kecamatan Dawe (Desa Kandangmas, Desa Cranggung, Desa Rejosari), Kecamatan Jekulo (Desa Terban). Ketebalan rata-rata dari andesit-pasir adalah 2 m sampai 5 m di Kecamatan Dawe, masing-masing di Desa Kandangmas seluas 5 ha, di Desa Cranggung seluas 2 ha, di Desa Rejosari seluas 2-3 ha, sedangkan di Desa Terban seluas 40 ha. Dengan demikian total andesit-pasir di Kabupaten Kudus yang potensial sekitar 50 ha dengan volume sekitar 2.705.000 m³ dan beratnya mencapai 9.504.300 ton.

Estimasi cadangan leusit yang terdapat pada andesit-pasir di Desa Menawan, Kecamatan Gebog sekitar 5 ha, volumenya mencapai 25.000 m³. Dengan asumsi berat

jenis leusit $2,64 \text{ kg/m}^3$, maka total cadangannya sekitar 66.000 ton.

b. Kaolin

Kaolin yang terdapat di Kabupaten Kudus berwarna putih dan berasal dari pelapukan tuff dengan penyebaran terbatas. Di Kabupaten Kudus terdapat di Kecamatan Dawe (Desa Kandangmas dan Desa Cranggang) dengan tebal berkisar 1,5 m hingga 2 m, sedangkan luas penyebarannya sekitar 1 ha hingga 1,5 ha.

Lapisan penutup yang teramati di lapangan tidak ada atau langsung ditemui lapisan kaolin, berwarna putih. Estimasi cadangan kaolin di dua desa tadi berkisar 20.000 m^3 dengan berta jenis $11,58 \text{ kg/m}^3$ maka cadangannya sekitar 31.600 ton di Desa Kandangmas dan 22.500 m^3 atau 35.500 ton di Desa Cranggang.

c. Andesit

Andesit di Kabupaten Kudus antara lain ditemukan di Kecamatan Dawe (Desa Cranggang, Desa Ternadi); Kecamatan Gebog (Desa Gondosari).

Penyebaran andesit ini hanya didapatkan di bagian utara Kabupaten Kudus, lereng sebelah selatan Gunung Muria, dengan ketebalan berkisar antara 2 m hingga 30 m. Andesit tersebut bersifat kompak, keras dan berwarna abu-abu hingga abu-abu hitam, berasal dari Gunung Muria. Luas penyebaran terbesar dari andesit terdapat di Kecamatan Dawe (Desa Ternadi dan Desa Cranggang) dengan luas penyebaran 2 ha, serta volume seluruhnya mencapai sekitar 600.000 m^3 atau 1.584.000 ton. Sedangkan di tempat lain seperti di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog penyebarannya terbatas yaitu sekitar 20.000 m^3 atau 52.800 ton.

Pada umumnya di daerah andesit ini tidak ada lapisan penutup dan langsung menjumpai andesit di permukaan. Selanjutnya singkapan andesit yang kecil terdapat di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe dengan luas penyebaran 625 m^3 dengan ketebalan sekitar 12,5 m sehingga volumenya mencapai $7812,5 \text{ m}^3$ atau 20.625 ton.

Selanjutnya apabila mau dimanfaatkan maka andesit yang ada di Desa Cranggang, Kecamatan Dawe sangat potensial untuk dieksplorasi dengan cara penambangan terbuka, mengingat selama ini masih dilakukan secara tradisional.

d. Andesit Sirtu dan Sirtu

Andesit Sirtu dan Sirtu ini di lapangan banyak didominasi andesit yang berupa fragmen dari gravel

sampai onkrah dan sebagian kecil pasir. Bahan galian tersebut terdapat sebagai endapan sungai seperti yang ditemukan di Kecamatan Gebog (Desa Rahtawu dan Desa Gondosari) Kecamatan Dawe (Desa Lau).

Ketebalan rata-rata dari bahan galian andesit-sirtu adalah 0,5 m sampai 6 m, sedangkan luas penyebaran yang cukup potensial terdapat di Desa Rahtawu dan Desa Gondosari Kecamatan Gebog seluas 25 ha. Tebal lapisan penutup untuk bahan galian ini tidak ada, sedangkan estimasi cadangan masing-masing sebesar 1.500.000 m³ atau 3.960.000 ton dan 50.000 m³ atau 88.500 ton. Andesit sirtu dan Sirtu di Desa Lau mencapai 375.000 m³ atau 491 ton.

e. Batu pasir-lempung

Penyebaran bahan galian batu pasir-lempung di daerah Kabupaten Kudus terdapat di Kecamatan Jekulo (Desa Bulungcangkring dan Desa Klaling). Kenampakan lapangan berupa lempung yang seringkali terdapat sisipan batupasir berwarna coklat kekuningan. Lempung berwarna coklat dan merupakan komponen yang lebih dominan dari pada pasirnya.

Deposit dengan cadangan cukup besar terdapat di Desa Bulungcangkring, yaitu seluas 25 ha. Estimasi volume mencapai 87.500.000 m³ atau sekitar 114.625.000 ton. Lapisan penutup bahan galian tersebut antara 0,5 m - 1 m di Desa Klaling, sedangkan di Desa Bulungcangkring tidak ada.

f. Tanah liat.

Tanah liat merupakan bahan galian golongan C yang paling banyak dijumpai di Kabupaten Kudus. Sedangkan deposit dengan cadangan yang cukup banyak terdapat di Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae dan Desa Terban, Kecamatan Undaan. Adapun tebal deposit dan luas penyebaran masing-masing lokasi tersebut adalah 5 m dan 31,5 ha, 3 m dan 400 ha, serta 3,5 m dan 900 ha.

Lapisan penutup untuk deposit tanah liat tidak ada, sedangkan estimasi cadangan terbesar yang terdapat di 3 desa tersebut di atas masing-masing 1.575.000 m³ atau 2.063.250 ton; 12.000.000 m³ atau 15.720.000 ton; dan 31.500.000 m³ atau 41.625.000 ton.

g. Gamping.

Batu gamping di Kabupaten Kudus hanya terdapat di bagian selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pati. Batu gamping tersebut terdapat di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan. Kenampakan di lapangan batu

gamping tersebut berwarna putih hingga putih kekuningan, sedangkan ketebalan rata-rata adalah 8,5 m, maka ditafsirkan volume batu gamping tersebut mencapai $1.500.000 \text{ m}^2 \times 8,5 \text{ m} = 12.750.000 \text{ m}^3$ dengan berta jenis sebesar $2,05 \text{ kg/m}^3$ maka total cadangannya sebesar 26.137.500 ton. Batu gamping tersebut tidak menunjukkan perlapisan, diduga merupakan hasil aktivitas organisme laut pada saat terbentuknya. Batu gamping yang terdapat di bagian selatan Kabupaten Kudus ini dibandingkan dengan Formasi Paciran yang umumnya tersusun dari batu gamping terumbu di daerah Rembang.

h. Tras

Tras di Kabupaten Kudus terdapat di Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Desa Kuwukan, Desa Cranggang, Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe; serta Desa Terban, Kecamatan Jekulo.

Dari estimasi cadangan tras ternyata cadangan di Desa Kuwukan dan Desa Cranggang mempunyai deposit terbesar sekitar 129.375.000 ton dan 45.983.000 ton yang sampai saat ini belum diusahakan penambangan dan pemanfaatannya, Selanjutnya hanya tras yang terdapat di Desa Menawan diusahakan sebagai material campuran membuat batako dan dilakukan penambangannya secara tradisional.

Tras yang terdapat di Desa Menawan, Kecamatan Gebog berwarna coklat kekuningan, kompak sampai agak kompak, mudah lepas apabila ditekan dengan tangan. Luas penyebarannya sekitar 25 ha, volumenya $6.250.000 \text{ m}^3$, berat jenisnya $1,38 \text{ kg/m}^3$ maka tonase cadangannya sekitar 8.625.000 ton. Sedangkan tras yang terdapat di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, sifat fisiknya berwarna abu-abu kekuningan, kompak sampai agak kompak, mudah lepas apabila ditekan dengan tangan. Luas penyebarannya 50 ha, volumenya $13.020.000 \text{ m}^3$, sehingga tonasenya sekitar 17.970.000 ton.

5. Hidrologi

a. Air Permukaan

Air permukaan yang dimaksud disini adalah sungai yang berair sepanjang musim dan sungai yang bersifat musiman (*intermittent*). Sungai yang mengalir sepanjang tahun diantaranya adalah Kali Serang, dimana sungai tersebut sejak tahun 1968 ditangani oleh proyek Jratunseluna, Departemen Pekerjaan Umum, untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air bersih dan

tenaga listrik. Di daerah perbukitan khususnya pada musim kemarau, sungai-sungai menjadi kering, setempat dijumpai sungai yang berair dengan debit sangat kecil.

Air permukaan merupakan air yang ada di permukaan tanah, baik berupa sungai ataupun danau. Di daerah penyelidikan, air permukaan umumnya dijumpai berupa sungai utama dengan cabang sungainya, sedangkan ranting sungai yang terutama berada di daerah perbukitan umumnya berupa sungai musiman atau kering di musim kemarau dan hanya berair di musim hujan.

Ada 2 sungai besar yang melintas di Kabupaten Kudus yaitu Kali Wulan dan Kali Juana. Kali Juana menampung aliran drainase dari arah timur dan Kali Wulan berperan untuk menampung aliran dari arah tengah sampai utara. Drainase Kota Kudus secara garis besar dilayani dengan saluran drainase yang dikombinasi dengan polder maupun long storage yang menampung kelebihan air selama terjadi banjir.

Secara keseluruhan sistem jaringan drainase di Kabupaten Kudus terbagi menjadi 4 (empat) sub sistem yaitu :

- 1) Subsistem Kali Wulan, menampung aliran dari drainase sekunder Kali Gelis, Kali Kondang dan Kali Kencing;
- 2) Subsistem SWD-1 menampung aliran dari drainase sekunder Kali Sumber, Kali Jaranan, Kali Sat/ Kali Beku dan Kali Serut;
- 3) Subsistem SWD-2 menampung aliran drainase sekunder Kali Tali, Kali Jember, dan Kali Srabi;
- 4) Subsistem Kali Juana-1 yang aliran dari semua drainase sekunder disebelah timur Kali Gelis dan Kali Kencing, seperti Kali Tumpang, Kali Dawe, Kali Jumirah, dan Kali Ngeseng.

b. Air Bawah Tanah

Berdasarkan atas jumlah, mutu dan kemudahan untuk mendapatkan air tanahnya, di Kabupaten Kudus dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) wilayah potensi air tanah yaitu :

1. Potensi air tanah sedang pada Akuifer Dangkal dan tinggi pada Akuifer Dalam.
2. Potensi air tanah sedang pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam.

3. Potensi air tanah rendah pada Akuifer Dangkal dan sedang pada Akuifer Dalam.
4. Potensi air tanah rendah pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam.
5. Potensi air tanah nihil pada Akuifer Dangkal dan rendah pada Akuifer Dalam.
6. Potensi air tanah nihil pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam.

6. Klimatologi

Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh zona iklim tropis basah. Bulan basah jatuh antara bulan Oktober - Mei dan bulan kering terjadi antara Juni - September, sedang bulan paling kering jatuh sekitar bulan Agustus. Curah hujan yang jatuh di Kabupaten Kudus berkisar antara 2.000 - 3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500 - 5.000 mm/tahun.

Temperatur tertinggi berkisar pada 30,5°C dan terendah berkisar pada 19,6°C dengan temperatur rata-rata 28°C. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban sekitar 74%. Kelembaban rata-rata bulanan berkisar antara 69 % - 78,5 %, angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan minimum 5 km/jam, kecepatan maksimum mencapai 50 km/jam.

Tabel 2.2.
Banyaknya Hari Hujan dirinci per Bulan
Di Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013 (Hari)

Bulan	2010	2011	2012	2013
Januari	22	21	18	20
Februari	15	16	11	14
Maret	12	21	13	14
April	12	15	7	13
Mei	14	6	5	12
Juni	9	3	3	10
Juli	8	6	1	8
Agustus	6	0	0	1
September	9	3	0	1
Oktober	11	9	6	5
November	6	15	7	8
Desember	18	13	13	17
Jumlah	142	128	84	123

Lokasi : Colo Dawe, Ketinggian : 700 m/DPL

Sumber : Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus Tahun 2013

Tabel 2.3.
Banyaknya Curah Hujan dirinci Per Bulan
Di Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013 (mm)

Bulan	2010	2011	2012	2013
Januari	112	362	572	747
Februari	74	282	233	381
Maret	177	432	243	405
April	167	158	145	366
Mei	223	83	69	234
Juni	122	19	73	146
Juli	91	130	5	264
Agustus	60	0	0	7
September	112	61	0	5
Oktober	147	64	30	44
November	87	106	125	195
Desember	278	273	183	631
Jumlah	1.650	1.970	1.678	3425

Lokasi : Colo Dawe, Ketinggian : 700 m/DPL

Sumber : Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus Tahun 2013

7. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat seluas 42.516 ha. Wilayah tersebut terdiri dari lahan pertanian seluas 28.266 ha (66,48%) dan lahan bukan pertanian seluas 14.250 ha (33,52%). Lahan pertanian terbagi atas lahan sawah seluas 20.629 ha (48,52%) dan bukan lahan sawah seluas 7.637 ha (17,96%), sedangkan lahan bukan pertanian terbagi atas rumah/halaman seluas 9.355 ha (22%), hutan negara seluas 1.882 ha (4,43%), rawa-rawa seluas 60 ha (0,14%) dan lainnya seluas 2.953 ha (6,95%).

Kawasan lindung di Kabupaten Kudus meliputi :

- a. Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.473 Ha berada di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog.
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yang merupakan kawasan resapan air. Kawasan ini sama dengan kawasan hutan lindung.
- c. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.069 Ha berupa kawasan sempadan sungai, kurang lebih 211 Ha berupa kawasan sekitar danau atau waduk, kurang lebih 84 Ha kawasan sekitar mata air, kurang lebih 1 Ha kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya serta kawasan ruang terbuka hijau.
- d. Kawasan Cagar Budaya seluas kurang lebih 195 Ha.
- e. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Kawasan rawan bencana alam meliputi :

- a. Kawasan rawan tanah longsor, meliputi : Desa Rahtawu, Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi, Desa Soco,

Desa Colo, Desa Japan, Desa Cranggung, Desa Glagah Kulon dan Desa Kuwukan Kecamatan Dawe.

- b. Kawasan rawan banjir, meliputi: Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan.
- c. Kawasan rawan bencana kekeringan, meliputi Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Undaan.
- d. Kawasan rawan bencana angin topan, meliputi seluruh wilayah kecamatan.
- f. Kawasan Lindung Geologi, meliputi kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa cekungan air tanah dan kawasan sempadan mata air.
- g. Kawasan Lindung Lainnya.

Adapun kawasan budidaya di Kabupaten Kudus meliputi :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi
 - 1) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.008 Ha meliputi Desa Ternadi, Desa Kajar Desa Colo Kecamatan Dawe, Desa Japan Kecamatan Dawe, Desa Menawan, Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo.
 - 2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.121 Ha meliputi Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling, Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo, dan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan.
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat
Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 2.285 Ha meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Undaan dan Kecamatan Jekulo.
Dari luas hutan rakyat, kurang lebih 106 Ha merupakan hutan rakyat murni, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 2.179 Ha terintegrasi dengan kawasan peruntukan tanaman pangan.
- c. Kawasan peruntukan pertanian
 - 1) Kawasan peruntukan tanaman pangan

- a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang lebih 25.334 Ha meliputi :
 - (1) Kecamatan Kaliwungu dengan luas kurang lebih 1.047 Ha;
 - (2) Kecamatan Jati kurang lebih 782 Ha;
 - (3) Kecamatan Undaan kurang lebih 6.464 Ha;
 - (4) Kecamatan Mejobo kurang lebih 2.668 Ha;
 - (5) Kecamatan Jekulo kurang lebih 4.701 Ha;
 - (6) Kecamatan Bae kurang lebih 811 Ha;
 - (7) Kecamatan Gebog kurang lebih 3.081 Ha; dan
 - (8) Kecamatan Dawe kurang lebih 5.780 Ha.
 - b) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang lebih 531 Ha, meliputi :
 - (1) Kecamatan Mejobo kurang lebih 15 Ha;
 - (2) Kecamatan Jekulo kurang lebih 39 Ha;
 - (3) Kecamatan Gebog kurang lebih 261 Ha; dan
 - (4) Kecamatan Dawe kurang lebih 216 Ha.
 - c) Kawasan peruntukan agropolitan berada di Kecamatan Undaan berupa kawasan yang diperuntukkan untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.
- 2) Kawasan peruntukan hortikultura
Kawasan peruntukan hortikultura berupa kawasan yang diperuntukkan untuk tanaman sayur-sayuran berada di seluruh wilayah kecamatan.
 - 3) Kawasan peruntukan perkebunan
Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas keseluruhan kurang lebih 8.387 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan terintegrasi dengan kawasan peruntukan tanaman pangan, terdiri :
 - a) tanaman tebu meliputi: Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kota, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jati;
 - b) tanaman kapuk tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - c) tanaman kelapa tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - d) tanaman kapas berada di Kecamatan Kaliwungu;
 - e) tanaman kopi meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe;

- f) tanaman cengkeh meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
 - g) tanaman mete meliputi Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Bae.
 - h) tanaman kemiri meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo.
 - i) tanaman aren meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo.
- 4) Kawasan peruntukan peternakan
- a) Kawasan peruntukan peternakan besar terdiri atas jenis hewan :
 - (1) sapi perah meliputi Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
 - (2) sapi tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - (3) kerbau tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - (4) kuda meliputi: Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
 - b) Kawasan peruntukan peternakan kecil tersebar di seluruh wilayah kecamatan terdiri atas jenis hewan kambing dan domba.
 - c) Kawasan peruntukan peternakan unggas terdiri atas jenis hewan :
 - (1) itik tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - (2) ayam ras pedaging meliputi: Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
 - (3) ayam ras petelur meliputi: Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
 - (4) ayam kampung tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- d. Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan darat diarahkan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.
- e. Kawasan peruntukan pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan dengan luas keseluruhan kurang lebih 34 Ha, meliputi :

- 1) Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo di Dukuh Kedungmojo dan sekitarnya seluas kurang lebih 23 Ha berupa andesit - pasir, tanah urug dan pasir.
- 2) Desa Rejosari Kecamatan Dawe di Dukuh Wonosari dan sekitarnya seluas kurang lebih 3 Ha berupa andesit - pasir, tanah urug dan pasir.
- 3) Desa Wonosoco Kecamatan Undaan di Dukuh Wonosoco Blok Gunung Bedhong seluas kurang lebih 4 Ha berupa batu kapur.
- 4) Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo di Dukuh Kali Wuluh seluas kurang lebih 4 Ha berupa andesit - pasir, tanah urug dan pasir.

f. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas keseluruhan sebesar kurang lebih 1.132 Ha terdiri atas :

- 1) Kawasan peruntukan industri besar direncanakan berkembang di sisi luar badan jalan dengan jarak terluar batas lahan pengembangan kurang lebih 500 meter ke kiri dan/atau ke kanan diukur dari as jalan meliputi jalan Jekulo - Pati dan jalan Kaliwungu - Jepara.
- 2) Kawasan peruntukan industri menengah direncanakan berkembang pada lokasi meliputi Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Bae dan Kecamatan Gebog.
- 3) Kawasan peruntukan industri kecil atau mikro tersebar di seluruh kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan berupa penataan dan pengelompokan menjadi sentra atau lingkungan industri kecil.

g. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata luas keseluruhan kurang lebih 35 Ha terdiri atas :

- 1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi Kawasan Museum Kretek di Kecamatan Jati, Kawasan Makam Sunan Kudus berada di Kecamatan Kota, Kawasan Makam Sunan Muria berada di Kecamatan Dawe, dan Kawasan Tradisional Desa Wonosoco berada di Kecamatan Undaan.
- 2) Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi Kawasan Wisata Gunung Muria berada di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog dan Kawasan Wisata Agro Kopi dan Jeruk Pamelon berada di Kecamatan Dawe.

- 3) Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan meliputi :
 - a) Kawasan Wisata Kuliner berada di Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati;
 - b) Kawasan Wisata Industri berada di Kecamatan Kota, dan Kecamatan Gebog;
 - c) Kawasan Wisata Belanja berada di Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati;
 - d) Kawasan Wisata Minat Khusus berada di Museum Kretek Kecamatan Jati; dan
 - e) Kawasan Wisata Olah Raga berada di GOR Wergu Kecamatan Kota.
- h. Kawasan peruntukan permukiman
 - 1) Permukiman perkotaan dengan luas keseluruhan kurang lebih 9.884 Ha meliputi kawasan perkotaan (seluruh wilayah Kecamatan Kota, seluruh Kecamatan Bae, seluruh Kecamatan Jati, sebagian Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Gebog dan sebagian Kecamatan Mejobo) dan ibu kota kecamatan meliputi Ibu kota Kecamatan Undaan, Ibu kota Kecamatan Dawe, Ibu kota Kecamatan Jekulo, Ibu kota Kecamatan Gebog dan Ibu kota Kecamatan Mejobo.
 - 2) Permukiman perdesaan dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.653 Ha meliputi permukiman di luar Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan.
- i. Kawasan peruntukan pertahanan

Kawasan peruntukan pertahanan berupa pemanfaatan ruang untuk pemerintah terkait bidang pertahanan dan keamanan yang meliputi :

 - 1) kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Kota;
 - 2) kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan;
 - 3) kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Kota; dan
 - 4) kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan.

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Kecamatan Gebog

- Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Gebog diarahkan pada pengembangan industri serta pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
- b. Kecamatan Dawe
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Dawe diarahkan pada pengembangan pariwisata pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan.
 - c. Kecamatan Jekulo
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jekulo diarahkan pada pengembangan industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
 - d. Kecamatan Mejobo
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Mejobo diarahkan pada pengembangan industri pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
 - e. Kecamatan Undaan
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Undaan diarahkan pada pengembangan agropolitan untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.
 - f. Kecamatan Jati
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jati diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
 - g. Kecamatan Kaliwungu
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kaliwungu diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
 - h. Kecamatan Kota
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kota diarahkan pada pengembangan pusat pelayanan permukiman.
 - i. Kecamatan Bae
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Bae diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

2.1.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada Tahun 2013 tercatat sebesar 797.003 jiwa, terdiri dari 394.382 jiwa laki-laki (49,48 %) dan 402.621 jiwa perempuan (50,52 %). Apabila dilihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2013 sebesar 97,95% atau 98% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Dengan kata lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan
di Kabupaten Kudus Tahun 2013

Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio (persen)
01. Kaliwungu	46.417	47.385	93.802	97,96
02. Kota	44.803	47.236	92.039	94,85
03. Jati	50.648	52.263	102.911	96,91
04. Undaan	35.453	35.619	71.072	99,53
05. Mejobo	35.908	36.334	72.242	98,83
06. Jekulo	50.469	51.386	101.855	98,22
07. Bae	33.790	34.380	68.170	98,28
08. Gebog	48.150	48.691	96.841	98,89
09. Dawe	48.744	49.327	98.071	98,82
JUMLAH	394.382	402.621	797.003	97,95

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2013

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 4 tahun (2010 - 2013) sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.5. menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2013 tercatat sebesar 1.875 jiwa per Km².

Tabel 2.5.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

Tahun	Luas daerah	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km2)
2010*	425,16	780.287	1.835
2011	425,16	785.585	1.848
2012	425,16	791.891	1.863
2013	425,16	797.003	1.875

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2013

*Mulai tahun 2010 menggunakan data dasar hasil SP2010

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan yang telah ditamatkan. Semakin tinggi proporsi penduduk yang berpendidikan, akan mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.6 menggambarkan komposisi dan peningkatan kapasitas penduduk Kabupaten Kudus dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan.

Tabel 2.6.
 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Kudus Tahun 2010-2012
 Dilihat dari Tingkat Pendidikan

Penduduk menurut Tingkat Pendidikan	2010	2011	2012
Tidak Sekolah	6,75	6,25	5,52
Tidak / Belum Tamat SD	14,53	15,95	13,89
Tamat SD	30,65	29,55	26,46
Tamat SLTP	21,16	21,95	23,65
Tamat SLTA	20,98	20,55	24,33
Akademi / Sarjana	5,92	5,72	6,14

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional dan BPS Kabupaten Kudus Tahun 2013

Persentase penduduk 10 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan potensi dan komposisi penduduk yang akan mempengaruhi kapasitas penduduk dalam pengembangan sumber daya yang dimilikinya. Kecenderungan dalam tiga tahun terakhir 2010-2012 dapat diketahui bahwa penduduk yang Tidak Sekolah cenderung menurun, Tidak/Belum Tamat SD masih fluktuatif, sedangkan Tamat SD cenderung menurun. Adapun penduduk menurut tingkat pendidikan tamat SLTP/SLTA dan Akademi/Sarjana kecenderungannya meningkat. Guna mendukung informasi diatas, perlu dijelaskan bahwa penduduk yang dikategorikan Tidak Sekolah adalah penduduk usia 10 tahun yang tidak mengenyam pendidikan, penduduk yang Tidak/Belum Tamat SD adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak tamat SD dan masih sekolah SD, Penduduk yang Tamat SD adalah Penduduk telah tamat SD/ sederajat baik yang melanjutkan pendidikan maupun tidak, penduduk yang Tamat SLTP adalah Penduduk yang telah tamat SLTP/ sederajat baik yang melanjutkan sekolah maupun tidak, penduduk tamat SLTA adalah penduduk yang telah tamat SLTA/ sederajat baik yang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi maupun tidak. Jumlah penduduk tamat SD merupakan jumlah terbanyak, yang diikuti jumlah penduduk tamat SMP dan SMA. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam tiga tahun terakhir banyak penduduk yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP cenderung meningkat, sedangkan penduduk yang Tamat SD menunjukkan kecenderungan menurun.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.7.

Berdasarkan tabel 2.7. dapat diketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus semakin membaik seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemerintah. Pada triwulan I tahun 2013 telah terjadi defisit neraca pembayaran maupun neraca perdagangan akibat melonjaknya harga minyak dunia. Kondisi tersebut menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sebagai langkah strategis, telah dipilih kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Implikasi kebijakan tersebut adalah sektor swasta yang melaksanakan penyesuaian harga. Efek rentetan siklus ekonomi tersebut adalah terjadi pergeseran tingkat keseimbangan pada pendapatan yang meningkat, diikuti peningkatan inflasi.

Angka pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat yaitu tahun 2010 sebesar 4,17 %, tahun 2011 sebesar 4,21%, tahun 2012 sebesar 4,33%, tahun 2013 sebesar 4,83 % dan prediksi tahun 2014 dan 2015 sebesar 5,13 % dan 5,37 %.

Pada pertengahan Januari 2014, terjadi bencana banjir secara merata dan berlangsung relatif lama. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya produksi dan distribusi barang maupun jasa. Dengan penanganan pasca banjir yang cepat dan tepat di berbagai sektor, maka perekonomian dapat normal dan meningkat produktivitasnya. Di samping itu, pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Kondisi ini tentu menimbulkan peningkatan jumlah uang beredar yang mendorong konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat hingga saat ini merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat mencapai 5,13 %. Adapun pada tahun 2015 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,37 % dengan asumsi pemerintahan yang terpilih dapat bekerja optimal dan terjalin kerjasama yang baik dan benar.

Berdasarkan tabel 2.7 dapat dilihat bahwa perkembangan ekonomi masih didominasi sektor industri, yang merupakan sektor berdaya ungkit tertinggi. Perkembangan kedua sektor tersebut mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, keuangan, dan angkutan. Sektor perdagangan berkembang hampir merata di berbagai wilayah baik yang modern maupun tradisional. Berlakunya CAFTA pada 2010 semakin mendorong persaingan dalam pangsa pasar. Kondisi ini perlu disikapi lebih cepat, tepat dan bijaksana, sehingga industri lokal dapat lebih kompetitif. Perkembangan sektor industri di Kudus lebih didongkrak dari industri besar, dimana pertumbuhannya cukup tinggi namun industri padat modal sehingga perlu dicari solusi untuk penyiapan peluang kerja mandiri.

Tabel 2.7.
 Nilai dan Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2014
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
 Kabupaten Kudus

(dalam jutaan)

NO	Sektor	2010	2011		2012		2013*		2014**		Rata-rata
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	
1	Pertanian	426.669	437.630	2,57	461.633	5,48	477.142	3,36	495.681	3,89	3,82
2	Pertambangan & Penggalian	4.029	4.294	6,58	4.760	10,85	4.824	1,34	4.913	1,84	5,15
3	Industri Pengolahan	7.651.696	7.938.351	3,75	8.168.626	2,90	8.543.023	4,58	8.969.675	4,99	4,06
4	Listrik, Gas & Air bersih	49.832	52.597	5,55	56.398	7,23	60.358	7,02	64.232	6,42	6,55
5	Konstruksi	206.119	233.681	13,37	245.636	5,12	249.786	1,69	265.798	6,41	6,65
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	3.503.267	3.652.622	4,26	3.878.330	6,18	4.119.973	6,23	4.349.097	5,56	5,56
7	Pengangkutan & Komunikasi	251.675	279.799	11,17	298.910	6,83	308.787	3,30	324.765	5,17	6,62
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	282.907	300.049	6,06	324.439	8,13	330.909	1,99	345.451	4,39	5,14
9	Jasa-jasa	274.863	295.030	7,34	315.852	7,06	324.128	2,62	339.011	4,59	5,40
	PDRB	12.651.059	13.184.051	4,21	13.754.585	4,33	14.418.932	4,83	15.158.623	5,13	

*Keterangan : * Angka Sementara*

*** Angka sangat sementara*

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel.2.8.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2014
 Atas Dasar Harga Berlaku
 Kabupaten Kudus

(dalam jutaan)

NO	Sektor	2010		2011		2012		2013*		2014**		Rata-rata
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	
1	Pertanian	884.591	2,81	950.856	2,81	1.079.747	2,92	1.181.243	2,92	1.292.280	2,92	2,88
2	Pertambangan & Penggalian	8.569	0,03	9.527	0,03	10.893	0,03	11.917	0,03	13.037	0,03	0,03
3	Industri Pengolahan	19.742.459	62,74	21.114.289	62,38	22.707.038	61,44	24.841.500	61,44	27.176.601	61,44	61,89
4	Listrik, Gas, & Air bersih	131.503	0,42	150.123	0,44	164.122	0,44	179.550	0,44	196.428	0,44	0,44
5	Konstruksi	457.799	1,45	525.244	1,55	602.878	1,63	659.549	1,63	721.546	1,63	1,58
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	8.272.931	26,29	8.916.516	26,34	9.931.325	26,87	10.864.870	26,87	11.886.168	26,87	26,65
7	Pengangkutan & Komunikasi angkutan & Komunikasi	422.536	1,34	464.544	1,37	507.120	1,37	554.790	1,37	606.940	1,37	1,37
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	712.168	2,26	795.029	2,35	899.967	2,44	984.564	2,44	1.077.113	2,44	2,38
9	Jasa-jasa	833.908	2,65	922.845	2,73	1.056.323	2,86	1.155.617	2,86	1.264.245	2,86	2,79
	PDRB	31.466.465	100,00	33.848.973	100,00	36.959.414	100,00	40.433.599	100,00	44.234.357	100,00	100,00

*Keterangan : * Angka Sementara*

*** Angka sangat sementara*

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2013

b. Laju Inflasi

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus selama tahun 2010-2013 sangat fluktuatif. Tingkat inflasi Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9.
Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Kudus	7,65	3,34	4,77	8,31	Angka inflasi s.d Maret 2014 sebesar 2,2
Jawa Tengah	6,88	2,68	4,24	7,99	Angka inflasi s.d Maret 2014 sebesar 1,58
Nasional	6,69	3,79	4,30	8,38	Angka inflasi s.d Maret 2014 sebesar 1,41

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

Laju inflasi Kabupaten Kudus tahun 2013 sebesar 8,31 %, lebih tinggi dibanding tahun 2012 sebesar 4,77 %. inflasi nasional yang mencapai 8,38% lebih tinggi dibanding inflasi Provinsi Jawa Tengah yaitu 7,99%. Memasuki awal tahun 2013, banjir di sejumlah wilayah Indonesia menghambat distribusi barang dan jasa telah mendorong inflasi. Sepanjang tahun 2013 inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Hal ini dipengaruhi oleh elastisitas perubahan harga terhadap permintaan terkait dan pilihan konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Inflasi terjadi karena peningkatan harga pada komoditas volatile foods antara lain bawang merah, cabe, daging ayam ras, telur, ikan dan kenaikan biaya transportasi sebagai imbas pengurangan subsidi BBM.

c. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Disparitas pendapatan penduduk yang dianalisis dengan penghitungan Indeks Gini menunjukkan besarnya ketimpangan pendapatan yang diperoleh penduduk suatu wilayah yang diproksi dengan pengeluaran / konsumsi penduduk untuk kebutuhan barang dan jasa. Indeks Gini melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini di Kabupaten Kudus pada tahun 2011 sebesar 0,3482 dan pada 2012 sebesar 0,3382. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Kudus relatif rendah dan semakin menurun.

Indeks Williamson Kabupaten Kudus ditinjau dari harga konstan pada tahun 2010 sebesar 0,8296 dan tahun 2011 sebesar 0,9058. Kondisi ini

menggambarkan bahwa tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kudus makin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas yang berkembang di masing - masing kecamatan yang relative heterogen. Ada kecamatan yang merupakan daerah dengan lapangan usaha industry dan perdagangan yang cukup maju seperti Kecamatan Kaliwungu, Kota dan Jati, sedangkan untuk kecamatan Bae, Jekulo dan Gebog adalah merupakan daerah kombinasi antara aktivitas ekonomi lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha industri. Kecamatan Undaan, Mejobo dan Dawe yang didominasi oleh lapangan usaha pertanian dengan pendapatan yang relative rendah. Dengan demikian akibat dari keberagaman sumberdaya ekonomi menjadikan kesenjangan pendapatan wilayah yang terjadi cukup besar.

d. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari Tahun 2008 ke 2012 terus mengalami penurunan. Untuk Tahun 2012 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 5.491 orang atau 7,5 %. Untuk Tahun 2013, diprediksi jumlah penduduk turun menjadi 57.706 atau 7,2% Penurunan ini terjadi karena adanya dampak positif pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.10.
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk Miskin	70.200	73.591	68.100	57.706
Jumlah Total Penduduk	777.437	768.972	791.891	800.670
Persentase Penduduk Miskin	9,02	9,57	8,6	7,2

*Keterangan : * Angka prediksi sementara, Data diolah Bappeda*

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2013

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan sosial antara lain : angka melek huruf, usia harapan hidup, dan pendapatan perkapita. Berdasarkan data statistik dapat disimpulkan bahwa dalam waktu empat tahun terakhir tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kudus semakin membaik. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Perkembangan Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Angka melek huruf (%)	99,87	100	100	100
2	Usia harapan hidup (tahun)	69,62	69,68	69,68	69,68
3	Pendapatan per kapita (000)	21.317,116	22.259,603*	23.939,695**	NA

*Keterangan : * Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2013

Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Data mulai Tahun 2011, warga melek huruf di Kabupaten Kudus telah mencapai 100 % dan pada Tahun 2012-2013 warga melek huruf di Kabupaten Kudus juga sudah mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program pendidikan dalam upaya menekan angka buta huruf khususnya di Kabupaten Kudus.

Usia Harapan Hidup (*Life expectancy at birth*) adalah rata-rata jumlah tahun harapan hidup sekelompok orang yang lahir pada tahun yang sama, dengan asumsi kematian pada usia masing-masing tersebut tetap konstan di masa mendatang. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kudus cenderung stabil, mulai Tahun 2011-2013 sebesar 69,68 tahun. Tingginya angka harapan hidup, dapat dicapai berkat fasilitas kesehatan yang lengkap dan canggih, tersedianya layanan kesehatan untuk manula, kebiasaan masyarakat hidup bersih dan disiplin, serta pola makan sehat. Hal ini seiring dengan peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan di Indonesia, angka tersebut terus meningkat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari :

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

a. Urusan Pendidikan

Layanan umum urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah, rasio ketersediaan sekolah, dan rasio jumlah guru dan siswa sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.12.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan isian versi APK
Kabupaten Kudus Tahun 2010- 2013

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI				
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Th (siswa)	71.368	82.672	76.244	83.903
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th	86.841	85.856	79.272	83.707
1.3	APK SD/MI (%)	101,88	101,32	106,31	100,24
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa)	28.909	40.155	38.880	43.852
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th	44.994	45.309	40.787	43.612
2.3	APK SMP/MTs (%)	97,12	96,00	104,42	100,55
3	SMA/SMK/MA				
3.1	Jumlah Murid Usia 16-18 Th (siswa)	31.030	36.550	33.411	38.346
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Th (orang)	42.671	48.571	41.567	43.963
3.3	APK SMA/SMK/MA (%)	72,72	75,25	86,79	87,22

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.13.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kudus Tahun 2010- 2013

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1	Usia 7-12 Th				
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Th (siswa)	84.093	86.792	78.797	83.724
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th	86.237	86.856	81.896	83.707
1.3	APS 7-12 Th (%)	97,52	99,93	96,44	100,03
2	Usia 13-15 Th				
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa)	45.273	44.914	40.902	44.111
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th	44.681	45.000	42.733	43.612
2.3	APS Usia 13-15 Th (%)	101,33	99,81	95,72	101,15
3	Usia 16-18 Th				
3.1	Jumlah Murid Usia 16-18 Th (siswa)	25.342	31.500	33.848	36.290
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Th (orang)	48.231	48.571	42.215	43.963
3.3	APS Usia 16-18 Th (%)	52,55	64,86	80,19	82,55

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2013

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dan juga sebagai ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS SD/MI pada Tahun 2010 tercapai 97,52 % cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2011 naik menjadi 99,93 % namun menurun kembali di Tahun 2012 menjadi 96,44 %, tetapi kembali naik menjadi 100,03 % di Tahun 2013. Kondisi ini menggambarkan penduduk usia sekolah SD/MI telah terlayani secara keseluruhan, bahkan terdapat siswa dari kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten Kudus. Adapun APS SMP/MTs di Kabupaten Kudus juga cenderung fluktuatif, karena pada Tahun 2010 mencapai 101,33 % menurun menjadi 98,81 % di Tahun 2011 dan pada Tahun 2012 juga kembali menurun menjadi 95,72 %, namun di Tahun 2013 kembali menaik hingga mencapai 101,15 %. Terjadinya angka partisipasi sekolah yang fluktuatif disebabkan adanya perubahan data penduduk yang berdasarkan SP 2000. Untuk APS SMA/MA/SMK Tahun 2010 mencapai 52,55% cenderung meningkat hingga Tahun 2013 tercapai sebesar 82,55 %. Dengan demikian penduduk usia 16-18 yang bersekolah di Kabupaten Kudus baru mencapai 82,55 %, sedangkan 17,45 % lainnya tidak sekolah. Hal ini disebabkan keterbatasan pembiayaan dari orang tua. Pemberian beasiswa dan dana untuk sekolah oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin setiap anak bisa bersekolah, masih diperlukan untuk meningkatkan APS di Kabupaten Kudus, terutama pada tingkat SMA/MA/SMK demi mewujudkan program Pemerintah Wajib Belajar 12 tahun, namun dibutuhkan kecermatan sehingga dapat tepat sasaran.

Tabel 2.14.
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kudus Tahun 2010- 2013

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI				
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	602	606	606	607
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	86.237	86.856	81.896	83.707
1.3	Rasio	69,81	69,78	73,99	72,52
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	113	113	113	115
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	44.681	45.000	40.787	43.612
2.3	Rasio	25,29	25,11	27,70	26,37
3	SMA/SMK/MA				
3.1	Jumlah Gedung Sekolah	71	71	76	78
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Th (orang)	48.231	48.571	41.567	43.963
3.3	Rasio	14,72	14,62	18,28	17,74

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2013

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dari Tahun 2010 sampai dengan 2012 cenderung mengalami peningkatan dari 69,81 menjadi 73,99. Namun di Tahun 2013 mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan menjadi 72,52. Untuk jumlah gedung sekolah cenderung mengalami kenaikan dari 602 di Tahun 2010 menjadi 607 di Tahun 2013.

Adapun jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2011 (25,29) mengalami penurunan dibanding Tahun 2010 (menjadi 25,11), tetapi mengalami kenaikan di Tahun 2012 (menjadi 27,70) dan kembali mengalami penurunan di Tahun 2013 menjadi 26,37. Dengan melihat rasio ketersediaan sekolah per penduduk SMP/MTs menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah relatif memadai, namun yang perlu mendapat perhatian adalah kesenjangan kualitas sarpras yang cukup lebar rasio sekolah di desa dibandingkan di kota.

Untuk jenjang SMA/MA pada Tahun 2013 rasio gedung sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun mencapai 17,74 dimana besaran rasio juga mengalami naik-turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besaran rasio ketersediaan sekolah tingkat SMA/MA sebesar 17,74 menunjukkan masih kurang memadai penyediaan sekolah tingkat SMA/MA, apalagi untuk menunjang wajib belajar 12 tahun.

Tabel 2.15.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI				
1.1	Jumlah Guru (orang)	6.859	6.798	6.943	6.915
1.2	Jumlah Murid (siswa)	87.297	87.483	83.764	83.813
1.3	Rasio	785,71	777,07	828,88	825,06
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Guru (orang)	3.173	3.085	3.149	3.110
2.2	Jumlah Murid (siswa)	42.029	42.239	41.483	43.545
2.3	Rasio	759,96	730,37	759,11	714,21
3	SMA/MA				
3.1	Jumlah Guru (orang)	2.492	2.574	2.596	2.659
3.2	Jumlah Murid (siswa)	31.676	33.050	32.783	34.041
3.3	Rasio	786,72	778,82	791,88	781,12

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2013

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio jumlah guru terhadap murid sebagaimana tertuang pada tabel 2.15. Dari tabel di atas, dapat dilihat perkembangan rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI, SPM/MTs dan SMA/MA. Rasio jumlah guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013

menunjukkan trend yang berkebalikan dimana jumlah murid cenderung turun namun jumlah guru cenderung naik. Namun untuk SMP/MTs perkembangan lebih fluktuatif, menurun pada Tahun 2011 dari 759,96 menjadi 730,37, tetapi tahun berikutnya naik kembali menjadi 759,11, namun di Tahun 2013 kembali turun menjadi 714,21. Untuk SMA/MA perkembangannya juga fluktuatif dimana pada Tahun 2011 menurun, tetapi di Tahun 2012 kembali naik dan di Tahun 2013 kembali menurun menjadi 781,12. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan guru cenderung mengalami peningkatan, namun masih perlu memperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas guru.

b. Urusan Kesehatan

Dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan pelayanan kesehatan dasar gratis, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan telah didukung melalui pemenuhan sarana prasarana dan tenaga medis serta paramedis yang masih perlu ditingkatkan, sebagaimana Tabel 2.16, 2.17, 2.18 dan 2.19 berikut.

Tabel 2.16.
Jumlah Puskesmas dan Pustu Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Puskesmas	19	19	19	19
2.	Jumlah Pustu	43	43	43	43
3.	Jumlah Penduduk	764.606	769.904	780.051	791.891
4.	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk	0,025	0,025	0,024	0,024
5.	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,057	0,057	0,055	0,051

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.17.
Jumlah Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	4	4	7	7
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	6	9	9
5.	Jumlah Penduduk	764.606	769.904	780.051	791.891
6.	Rasio (per 1000 penduduk)	0,00785	0,00779	0,01154	0,01137

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2.17 di atas dapat diketahui bahwa rasio jumlah rumah sakit dibanding jumlah penduduk semakin meningkat dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, tetapi mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2013 karena tidak ada penambahan jumlah rumah sakit sedangkan jumlah penduduk mengalami peningkatan. Menurut standart WHO, target Indonesia Sehat 2010, perlu disediakan 40 dokter umum untuk melayani 100.000 penduduk. Berdasarkan data Tabel 2.18, rasio jumlah dokter per jumlah penduduk pada Tahun 2012 mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2011, karena ada dokter yang melanjutkan pendidikan spesialis. Pada Tahun 2013 rasio jumlah dokter meningkat menjadi 0,428, akan tetapi belum memadai jika dibandingkan dengan rasio ideal tiap dokter terhadap 100.000 penduduk. Menurut Indonesia Sehat 2010 adalah 40 per 100.000 jumlah penduduk (satu orang dokter melayani 2.500 penduduk).

Tabel 2.18.
Jumlah Dokter Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Dokter	283	288	282	339
2.	Jumlah Penduduk	764,606	769.904	780.051	791.891
3.	Rasio (per 1000 penduduk)	0.37013	0.37407	0,36151	0,42809

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Untuk rasio jumlah tenaga perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dari Tahun 2010 sampai Tahun 2012 mengalami peningkatan, akan tetapi menurun pada Tahun 2013 (Tabel 2.19). Berdasarkan data yang ada jumlah tersebut tidak mengalami penambahan yang signifikan, karena para tenaga kesehatan tidak memperpanjang ijin praktek di wilayah Kabupaten Kudus yang disebabkan kemungkinan pindah domisili atau diterima bekerja di luar kota.

Tabel 2.19.
Jumlah Tenaga Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya
Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Perawat	757	1.099	1.082	1.083
2.	Jumlah Bidan	276	378	442	479
3.	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	245	433	635	487
4.	Jumlah Penduduk	764.606	769.904	780.051	791.891
5.	Rasio (per 1000 penduduk)	1,67145	2,48083	2,76777	2,58748

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup, yang cenderung

mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sampai Tahun 2013. Kasus kematian ibu pada Tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 21 kasus (132,68), angka ini lebih tinggi dibanding target nasional maupun target Provinsi Jawa Tengah yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti kelainan jantung, TB Paru, hepatitis, keracunan makanan. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia dan jumlah anak (paritas) serta faktor penyebab langsung lainnya seperti eklampsia, perdarahan dan emboli. Angka Kematian Bayi cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sampai Tahun 2013, akan tetapi pencapaian Angka Kematian Bayi AKB Kabupaten Kudus masih lebih rendah dibandingkan target MDGs nasional yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup. Untuk pencapaian target Angka Kematian Balita (AKBa) juga lebih rendah dari target MDGs nasional yaitu 32 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.20.
Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan
Angka Kematian Balita Tahun 2010 - 2013

No	Variabel Indikator	2010	2011	2012	2013
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,62	69,68	69,68	69,68
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	98,95 (15 kasus)	103,7 (16 kasus)	95,4 (15 kasus)	132,68 (21 kasus)
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	1,5 (23 bayi)	5,6 (86 bayi)	6,9 (109 bayi)	7,1 (112 bayi)
4	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	1,4 (21 balita)	7,1 (110 balita)	7,4 (117 balita)	8,4 (132 balita)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Perkembangan Angka Kematian Bayi dihitung per 1000 kelahiran hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penyebab AKB cenderung mengalami peningkatan dikarenakan permasalahan kematian bayi sangat kompleks, yaitu dari lingkungan, pelayanan kesehatan, faktor keturunan dan perilaku. Hal ini sebetulnya dapat dicegah sejak dari mulainya konsepsi yaitu mulai WUS (Wanita Usia Subur), PUS (Pasangan Usia Subur), hamil, bersalin dan bayi baru lahir. Adanya skrining awal sebelum hamil agar tidak melahirkan bayi yang beresiko tinggi yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian bayi, serta adanya upaya yang konkret dari semua pihak terkait tidak hanya pada SKPD Kesehatan saja, sangat diperlukan agar dapat tercapai dari target yang ditetapkan.

Untuk Angka Kematian Balita yang cenderung fluktuatif meningkat dari tahun ke tahun, disebabkan kematian balita 2/3 didukung oleh kematian bayi sehingga sulit rasanya untuk dapat turun bila tidak terjadi penurunan pada angka kematian bayinya. Penurunan kasus kematian

pada balita dapat tercapai apabila dilaksanakan upaya preventif yang dilakukan sejak WUS, PUS, hamil, bersalin dan bayi baru lahir serta peran serta dari seluruh SKPD terkait.

c. Urusan Pekerjaan Umum

Status jalan di Kabupaten Kudus terbagi menjadi tiga golongan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. Ketiga golongan tersebut adalah jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan panjang 697.299 km. Jalan nasional yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur Pantura atau disebut juga jalan Daendels, sepanjang 21.180 km atau 3,04 % dari total panjang jalan, sedangkan jalan provinsi sepanjang 54.939 km atau 7,88 % dan jalan kabupaten sepanjang 621.180 km atau 89,08 %.

Dilihat dari jenis permukaannya baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten, jalan beraspal sepanjang 611.393 km (87,68 %), jalan berpermukaan kerikil (makadam) sepanjang 48.140 km (6,90 %), jalan berpermukaan tanah sepanjang 4.620 km (0,66 %), serta tidak diperinci (beton) sepanjang 33.146 km (4,76 %). Sedangkan bila dilihat dari kondisi jalan, jalan kondisi baik mencapai 247.271 km (35,46 %), jalan kondisi sedang mencapai 257.390 km (36,91 %), jalan kondisi rusak ringan mencapai 91.009 km (13,05 %) dan jalan rusak berat mencapai 101.629 km (14,58 %). Untuk perkembangan jalan kabupaten, mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami penambahan panjang jalan sebesar 136.955 km dari panjang jalan tahun 2009 yang disebabkan adanya penambahan jalan kabupaten yang berasal dari jalan poros desa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 620/129/2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, sedangkan kondisi jalan kabupaten dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.21.
Kondisi Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Kondisi Jalan	Satuan	2010	2011	2012	2013
1	Baik	meter	119.996	164.742	216.692	251.165
		%	19,34	26,55	34,88	40,43
2	Sedang	meter	208.860	165.886	219.990	206.350
		%	33,55	26,62	35,41	33,22
3	Rusak Ringan	meter	123.506	156.939	82.869	56.825
		%	19,91	25,29	13,34	9,15
4	Rusak Berat	meter	168.818	133.613	101.629	106.840
		%	27,20	21,53	16,37	17,20
	Jumlah		621.180	621.180	621.180	621.180

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2013 mencapai 40,43 %, sedangkan kondisi jalan lingkungan sampai dengan tahun 2013 yang sudah tertangani sepanjang 141.072,30 meter

dengan kondisi baik. Pembangunan jembatan di Kabupaten Kudus dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan baik dari aspek peningkatan kondisi jembatan maupun peningkatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan. Jumlah dan kondisi jembatan di Kabupaten Kudus tahun 2010 - 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22.

Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Kondisi Jembatan	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
1	Baik	unit	160	167	169	170
		%	74,77	76,96	77,17	77,27
2	Sedang	unit	34	33	38	38
		%	15,89	15,21	17,35	17,27
3	Rusak	unit	20	17	12	12
		%	9,34	7,83	5,48	5,45
	Jumlah		214	217	219	220

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Berdasarkan tabel 2.22 di atas diketahui bahwa jumlah jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jembatan dalam kondisi sedang diupayakan pemeliharaan sehingga kondisinya tetap terjaga. Adapun jembatan dalam kondisi rusak diupayakan rehabilitasi sehingga jumlahnya tidak bertambah.

Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2013 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2.23.

Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013 (Ha)

Kondisi Daerah Irigasi	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Baik	6.402,70	8.980,00	9.807,00	7.024,98
Rusak Ringan	3.302,14	1.102,00	944,25	698,72
Rusak Berat	5.798,16	5.421,00	4.316,75	2.550,95
Total	15.503,00	15.503,00	15.068,00	10.274,65

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus

Daerah Irigasi secara keseluruhan di Kabupaten Kudus sebesar 15.068 Ha. Dari jumlah total tersebut yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar 10.274,65 Ha. Adapun sisanya sebesar 2.805 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 1.988,35 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Kondisi Daerah Irigasi (DI) dengan kondisi baik perlu dipertahankan kualitasnya melalui pemeliharaan, sehingga mampu mengairi lahan pertanian secara optimal, sedangkan DI dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat perlu

dilakukan rehabilitasi sehingga kondisinya menjadi baik untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi. Pada tahun 2013 luas lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah 28.169 Ha sehingga rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah sebesar 0,25.

d. Urusan Perumahan

Urusan perumahan telah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat, pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pemberdayaan komunitas perumahan dan pemeliharaan areal pemakaman. Adapun indikator keberhasilan yang telah dicapai antara lain terwujudnya fasilitas permukiman yang layak huni dengan persentase sebesar 87,36 % yang meningkat dibanding tahun 2012 yang sebesar 86,85 %. Jumlah rumah tangga bersanitasi dengan prosentase sebesar 93,17 % yang juga meningkat dari tahun 2012 yang presentasinya sebesar 92,71 %. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 1,655 menurun dari tahun 2012 yang sebesar 1,667 %, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat areal pemakaman umum tidak bertambah. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 100 %, Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 33,33 %. Fasilitasi dan replikasi PLPBK (Penataan Lingkungan Komunitas Berbasis Komunitas) untuk 1 desa yaitu desa Padurenan.

e. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan meliputi tiga hal yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum yang disusun berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 16 Tahun 2012. Sedangkan rencana rinci disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang terdiri atas 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten. Dokumen perencanaan yang telah disusun tahun 2010 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tahun 2010-2013

2010	2011	2012	2013
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RDTRK IKK Jekulo 2. Penyusunan RTBL Kaw. Perkotaan (difokuskan di Jl. R. Agil Kusumadya, Jl. Sunan Kudus, Jl. Jend. Sudirman) 3. Penyempurnaan Ranperda RTRW (persetujuan substansi dari Gubernur) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RTBL Kaw. Perkotaan (difokuskan di Jl. Tembus Kencing-Tanjung dan Tugu Identitas-Simpang Tujuh) 2. Penyempurnaan Ranperda RTRW (persetujuan substansi dari Kementerian PU) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RDTRK 4 IKK dan Penyusunan Raperda RDTRK 2 Kawasan 2. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 3. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 2. Lokakarya dan Penyempurnaan 6 (enam) raperda RDTR Kawasan Perkotaan (Persetujuan substansi dari Gubernur)

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2013

Adapun pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang untuk aparat Pemerintah daerah.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah diperlukan dalam suatu kebijakan pembangunan. Pada kondisi sekarang ini, masyarakat berperan sebagai obyek pembangunan dan subyek dalam pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat secara transparan akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, diamanatkan bahwa Pemerintah harus memfasilitasi terlaksananya proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Pada awal tahun 2014, Perda RPJMD Kabupaten Kudus 2013-2018 belum diperdakan, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah menggunakan rencana program, sasaran dan pagu indikatif tahun pertama yang disusun dalam Rancangan awal RKPD 2015. Rancangan awal RKPD ini, dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan mulai dari musrenbang secara berjenjang untuk menghasilkan RKPD, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS sampai dengan penyusunan APBD. Tantangan bagi

pemerintah daerah adalah menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani hingga akhir periode RPJMD dan masalah-masalah yang akan dihadapi pada periode pertama masa pemerintahan baru.

g. Urusan Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari keberadaan terminal dan jumlah kendaraan yang transit sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.
Tipe Terminal dan Jumlah Kendaraan yang Transit Tahun 2010-2013

No	Nama Terminal	Tipe	Kendaraan Transit (buah)			
			2010	2011	2012	2013
1	Terminal Jati Kudus	A	126.717	125.656	106.608	94.960
2	Terminal Jetak	B	72.934	65.162	48.165	37542
3	Terminal Kalirejo	B	16.794	13.724	11.421	8.820
4	Terminal Getas	C	25.037	19.743	15.293	15.224
5	Terminal Singocandi	C	-	-	-	-
6	Terminal Padurenan	C	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Berdasarkan tabel 2.25 dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan yang transit di berbagai terminal mengalami penurunan, padahal kualitas sarana terminal telah ditingkatkan dengan berbagai pembangunan. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pemanfaatan kendaraan umum ke kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua.

Tabel 2.26.
Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2010-2013

No	Sarana Prasarana	Satuan	Kendaraan Transit (buah)			
			2010	2011	2012	2013
1	Alat Uji Kendaraan	Unit	9	9	9	9
2	Traffic Light	Simpang	19	21	25	25
3	Rambu-rambu lalu lintas	Buah	1.348	1.898	2.088	2.163
4	Marka	M2	3.128	3.808	6.462	7.342
5	Guardrail	M	50	298	446	570

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Dalam upaya mendukung pelayanan prima kepada pengguna jasa perhubungan serta kebijakan preventif dan represif guna mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas, maka penyediaan sarana dan prasarana menjadi prioritas untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan dapat

menjangkau ke seluruh wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan.

h. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup diupayakan untuk pengelolaan persampahan di perkotaan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Data upaya pelayanan sarana dan prasarana urusan lingkungan hidup dari tahun 2010 - 2013 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.27.
Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2010-2013

No.	Jenis Informasi	Tahun				Satuan
		2010	2011	2012	2013	
1	Sarana IPAL :					
	- Jumlah	8	0	2	3	Buah
	- Volume	439,60	0	96	10.800	M3
2	Luas Lahan Kritis	5.542,00	5.484,69	5.445,95	5.358,77	
	- Kritis	414,00	386,18	374,93	337,79	Ha
	- Agak Kritis	5.128,00	5.098,51	5.071,01	5021,01	Ha
3	Limbah Pabrik					
	- Volume	185.428	185.428	185.428	6.111,89	M3/ bln
4	RTH (Ruang Terbuka Hijau)					
	- Pohon Turus Jalan	118.901	40.050	40.050	40.050	Batang
	- Pemeliharaan Hutan Kota	4	0	0	4	lokasi
5	Pelayanan Persampahan Perkotaan					
	- Volume timbulan sampah	636,6	640,2	609,4	615,6	M3/Hr
	- Volume sampah yang terangkut ke TPA	501,2	514,9	501,4	521,1	M3/Hr
	- Persentase	79	80	82	84,65	%
6	Sarana dan Prasarana Persampahan					
	- Dumptruck	16	16	16	17	Unit
	- Truck arm roll	6	6	6	4	Unit
	- Truck engkel	3	3	3	2	Unit
	- Container	26	27	25	18	Unit
	- Bulldozer	1	1	1	1	Unit
	- Excavator	1	1	1	1	Unit
	- Becak sampah	130	144	144	112	Unit
	- Becak motor sampah	23	26	26	21	Unit
	- Depo sampah tipe B	8	8	8	9	Lokasi
	- Incenerator	1	1	1	-	Unit
	- TPA	1	1	1	1	Lokasi
7	Jumlah tenaga outsourcing kebersihan	51	26	26	24	Orang

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2013

i. Urusan Pertanahan

Pelayanan urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka fasilitasi manajemen pertanahan berbasis masyarakat khususnya di kelurahan sehingga tersedia database tanah secara akurat. Di samping itu, pengadaan tanah untuk waduk Logung diupayakan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran daerah. Kebutuhan tanah untuk waduk Logung adalah 196 Ha, sampai dengan tahun 2013 rekapitulasi pengadaan tanah untuk waduk Logung telah mencapai luas sebesar 93,14 Ha dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 31.777.169.000,-. Sisa lahan yang belum dibebaskan sebanyak 55,28 Ha (tanah milik masyarakat) dan 47,64 Ha (tanah milik Perhutani). Pada tahun 2013 juga telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 05/SPRIN/Ad/X/2013, Nomor 611.1/3342/2013 dan Nomor 112 Tahun 2013 tentang Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan PKS tersebut, sisa lahan yang perlu dibebaskan membutuhkan biaya sebesar Rp. 67.883.000.000,- yang merupakan sharing antara Kabupaten Kudus dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 50 % : 50%.

j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pelaksanaan e-KTP adalah menjamin ketersediaan sarana pendukung di setiap tempat pelayanan KTP elektronik, mempersiapkan tenaga teknis, serta menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai Tahun 2013 sebesar 877.948. Dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 644.581, yang sudah ber KTP pada tahun 2013 tercatat sebesar 638.787 atau meningkat sebesar 1,82 % dibandingkan tahun 2012 sebesar 627,379. Jumlah penduduk ber KK mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 246.682 menjadi 264.003 pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 7,02 %. Jumlah penduduk memiliki akte kelahiran mengalami kenaikan dari 515.769 pada tahun 2012 menjadi 544.256 pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 5,52 %.

k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka menjamin keadilan gender, maka telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) melalui Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Juli 2010 Nomor : 411.4/157/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010. Pada Tahun 2010 jumlah Organisasi Perempuan Kabupaten Kudus mencapai 40 organisasi dengan jumlah anggota mencapai 47.123 orang. Sedangkan apabila dilihat pada 5 organisasi massa perempuan terbesar di Kabupaten Kudus dengan

jumlah anggota terbesar pada Tahun 2013 sebanyak 45.024 orang, sebagaimana tertera pada Tabel 2.28 berikut :

Tabel 2.28.
Organisasi Perempuan dengan Jumlah Anggota Terbesar Tahun 2013

No	Nama Organisasi Perempuan	Jumlah Anggota (orang)
1.	Muslimat NU	36.000
2.	DPD II Pengajian Al Hidayah	3.797
3.	Dharma Wanita Persatuan	3.757
4.	Aisyiyah	1.050
5.	Bhayangkari	420
	Jumlah	45.024

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2013

Pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari partisipasi peran aktif perempuan di semua bidang kehidupan yang dapat diukur diantaranya dari jumlah keanggotaan perempuan di DPRD, sebagaimana Tabel 2.29 berikut :

Tabel 2.29.
Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD Tahun 2010 – 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah DPRD Perempuan	6	6	6	6
2.	Jumlah Anggota DPRD	45	45	45	45
3.	Rasio	13,33 %	13,33 %	13,33 %	13,33%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2013

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak diantaranya melalui penyelesaian pengaduan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Tahun 2010 sampai Tahun 2013 semua pengaduan dapat diselesaikan seluruhnya. Untuk jumlah kasus KDRT maupun kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada BPMPKB pada Tahun 2013 relatif kecil yakni hanya 7 kasus.

Tabel 2.30.
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah KDRT	38	69	61	3
2.	Jumlah penyelesaian KDRT	38	69	61	3
3.	Persentase penyelesaian KDRT	100	100	100	100
4.	Jumlah kekerasan terhadap anak	30	33	31	4
5.	Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap anak	30	33	31	4
6.	Persentase penyelesaian kekerasan terhadap anak	100	100	100	100

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2013

1. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai peran penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui kegiatan antara lain : penyiapan dukungan kelembagaan yang efektif, optimalisasi pendayagunaan tenaga program KB, penyediaan sarana prasarana, serta manajemen dan pembiayaan. Dalam pelaksanaan program KB, Pasangan Usia Subur (PUS) sebagian besar telah menjadi akseptor KB. Hal ini ditunjukkan dari rasio akseptor KB dari Tahun 2010 sampai Tahun 2013 yang cenderung menunjukkan kenaikan, tetapi pada Tahun 2013 lalu mengalami sedikit penurunan.

Tabel 2.31.
Rasio Akseptor KB Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah akseptor KB	108.628	112.669	118.707	112.927
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	136.459	136.981	144.149	142.575
3.	Rasio akseptor KB	79,60	82,25	82,35	79,21

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2013

Dari data Tabel 2.31 diketahui bahwa rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Tahun 2010-2012 cenderung mengalami kenaikan, dari 79,60% pada Tahun 2010 naik menjadi 82,35 % di Tahun 2012. Namun mengalami penurunan pada Tahun 2013 menjadi sebesar 79,21%. Hal ini disebabkan semakin terbatasnya tenaga PLKB/PKB di lapangan yang menyebabkan berkurangnya intensitas pembinaan KB kepada para akseptor sehingga menyebabkan sebagian akseptor melakukan *Drop Out* (DO).

Tabel 2.32.
Metode Kontrasepsi KB Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Metode KB	2010	2011	2012	2013
1.	Suntik	15.783	15.211	16.561	14.886
2.	Pil	6.243	6.304	6.584	5.271
3.	Kondom	1.054	1.118	1.280	1.067
4.	AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam	694	618	1.288	1.250
5.	Implan/Susuk	565	599	1.859	2.087
6.	MOW (Medis Operasi Wanita)	572	366	413	511
7.	MOP (Medis Operasi Pria)	22	19	5	6

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2013

Pada Tabel 2.32 terlihat metode kontrasepsi yang banyak digunakan adalah Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), yaitu metode suntik dan pil, sedangkan untuk metode MKJP yang banyak dipakai adalah Alat Implan/Susuk dan AKDR/Spiral.

Adapun perkembangan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera I dari Tahun 2010 – 2013 cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut ini :

Tabel 2.33.
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah keluarga prasejahtera	25.934	25.887	24.866	23.757
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	39.644	38.990	40.858	39.586
3.	Jumlah KK	203.334	208.505	209.866	217.721
4.	Persentase keluarga prasejahtera	12,75	12,41	11,84	10,91
5.	Persentase keluarga sejahtera I	19,50	19	19,46	18,18

Sumber : *BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2013*

Jumlah keluarga pra sejahtera pada Tahun 2010 sebesar 25.934 KK atau 12,75 % menurun menjadi 23.757 KK atau 10,91 % pada Tahun 2013. Adapun jumlah Keluarga Sejahtera I cenderung fluktuatif, dimana dari Tahun 2010 sebesar 39.644 KK mengalami penurunan di Tahun 2011, tetapi naik kembali di Tahun 2012 dan kembali mengalami penurunan pada Tahun 2013 menjadi 39.586 KK.

m. Urusan Sosial

Pelaksanaan Urusan Sosial meliputi berbagai pemberian fasilitasi bantuan sosial dan hibah berupa pemberian bantuan hibah berupa uang kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam perlindungan sosial dilaksanakan antara lain melalui program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pembinaan anak terlantar dan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Kinerja pelayanan sosial dapat dilihat pada indikator jumlah sarana sosial, dan jumlah PMKS. Berdasarkan Tabel 2.34 menunjukkan bahwa sarana sosial pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berjumlah 18 unit dengan jumlah PMKS yang cenderung menurun dari tahun 2010 sebanyak 62.737 orang menjadi sebanyak 57.542 orang pada tahun 2012.

Tabel 2.34
Kinerja Pelayanan Sosial Tahun 2010 – 2013
Kabupaten Kudus

NO	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah sarana sosial	18	18	18	18
2	Jumlah PMKS	62.737	58.286	57.542	24.494
3	Jumlah PMKS terlayani	7.439	11.519	9.470	6.474
4	Jumlah PSKS	406	406	406	597

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Tahun 2013

n. Urusan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dikategorikan sebagai tenaga kerja bila penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk sebagai angkatan kerja dalam waktu seminggu yang lalu telah bekerja. Penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja pada tahun 2010 berjumlah 347.560 orang, sedangkan pada tahun 2013 (berdasarkan data sementara) berjumlah 402.091 orang atau rata-rata meningkat 1,96%. Jumlah pencari kerja pada tahun 2010 sebesar 26.152 orang, meningkat menjadi 35.019 orang pada tahun 2013 atau sebesar 33,91%. Adapun penduduk yang mengurus rumah tangga meningkat dari tahun 2010 sejumlah 85.893 orang, pada tahun 2013 menjadi 94.683 orang atau meningkat 10,23%. Upaya pembangunan daerah melalui urusan ini, diarahkan bagi perluasan kesempatan kerja/berusaha khususnya bagi penganggur dan mengurus rumah tangga sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi dan daya saing dalam mencari ataupun menciptakan lapangan kerja mandiri. Namun demikian kendala yang dihadapi pemerintah yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan calon tenaga kerja. Gambaran Penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013 dapat dilihat dalam tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35.
Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu

No	Uraian	2010	2011	2012	2013*
1	Penduduk bekerja >15	394.361	383.399	410.519	402.091
2	Pencari kerja	-	-	-	-
	Pengangguran	26.152	25.391	25.522	35.019
3	Mengurus Rumah Tangga	85.893	103.241	85.892	94.683
4	Sekolah	44.499	44.126	39.275	35.745
5	Lainnya	32.770	29.227	19.326	26.532

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2013

Keterangan : *) Angka sementara

o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi. Koperasi berfungsi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan agen dalam intermediasi permodalan yang dekat dengan masyarakat. Koperasi dapat dikelompokkan menjadi aktif dan tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan. Perkembangan koperasi aktif dapat dilihat pada tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Jumlah Koperasi di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2013

No	Keterangan	Jumlah Koperasi			
		2010	2011	2012	2013
1.	Koperasi Aktif	352	378	432	448
2.	Koperasi tidak aktif	67	67	65	65
3.	Jumlah Koperasi	419	445	497	513
4.	Prosentase koperasi aktif	84,00	84,94	86,92	87,33
5.	Anggota Koperasi	245.383	245.875	248.435	248.963

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah koperasi dari tahun 2010-2013 yaitu jumlah koperasi aktif bertambah 96 unit, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif menurun 2 unit. Seiring dengan meningkatnya jumlah koperasi, maka jumlah anggota koperasi juga meningkat sebanyak 3.580 orang. Sedangkan prosentase koperasi aktif meningkat dari 84 % menjadi 87 %. Hal ini menunjukkan pelayanan penunjang di daerah melalui koperasi semakin besar dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya meningkat. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan manajemen dan pemasaran serta fasilitasi dalam hal permodalan, peningkatan teknologi, serta pembinaan dan pengawasan perkoperasian. Usaha kecil merupakan peluang usaha unit-unit ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Perkembangan jumlah usaha kecil, menengah dan besar serta penyerapan tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel 2.37 dan 2.38 berikut ini.

Tabel 2.37.
Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus Tahun 2010-2013

No	Kategori Usaha	Jumlah UMKM (unit)			
		2010	2011	2012	2013
1.	Usaha Mikro dan Kecil	10.232	10.232	10.315	11.159
2.	Usaha Menengah	3.123	3.123	3.270	2.434
3.	Usaha Besar	86	86	86	124

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.38.
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM di Kabupaten Kudus
Tahun 2010-2013

No	Kategori Usaha	Jumlah (orang)			
		2010	2011	2012	2013
1.	Usaha Mikro dan Kecil	43.040	43.040	43.172	44.102
2.	Usaha Menengah	121.435	121.435	121.557	114.461
3.	Usaha Besar	3.848	3.848	3.871	3.847

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Dalam kurun waktu 2010-2013, peningkatan jumlah usaha terjadi pada tahun 2013 untuk kategori usaha mikro dan kecil sebesar 844 unit dan kategori usaha besar sebesar 38 unit, namun untuk usaha menengah mengalami penurunan sebesar 836 unit. Hal ini disebabkan usaha menengah mengalami tekanan usaha sehingga berkategori menurun menjadi usaha kecil dan yang berkategori usaha mikro dan kecil sebagian besar tidak mengalami perkembangan sehingga masih di kategori usaha mikro dan kecil. Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya, pada tahun 2013 jumlah penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 930 orang di sektor usaha mikro dan kecil serta terjadi penurunan pada usaha menengah sebanyak 7.096 orang. Hal ini disebabkan adanya modernisasi teknologi dan turunnya sebagian pelaku usaha dari usaha menengah menjadi usaha kecil sehingga terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja.

p. Urusan Penanaman Modal

Kabupaten Kudus telah berinisiatif memberikan kemudahan bagi investor melalui penerbitan peraturan yang pro investasi. Beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah telah dicabut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pencabutan Beberapa Perda Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sampai tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (*One Stop Service*).

Perkembangan investasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39.
Perkembangan Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013 (juta rupiah)

Tahun	PMA	PMDN Fasilitas	PMDN Non Fasilitas	Jumlah
2010	0	0	4.382.351,6	4.382.351,6
2011	22.815,5	0	6.580.571,6	6.603.387,1
2012	0	0	12.163.499,07	12.163.499,07
2013	11.374,8	0	11.568.452,70	11.579.827,50

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus Tahun 2013

Berdasarkan tabel 2.39 di atas, terlihat perkembangan total investasi di Kabupaten Kudus yang semakin meningkat dari tahun 2010 sampai

dengan 2013. Realisasi investasi asing hanya ada Pada tahun 2011 dan tahun 2013 walaupun di tahun 2013 mengalami penurunan dari 22.815,5 juta rupiah menjadi hanya 11.374,8 Juta Rupiah, namun untuk investasi dalam negeri non fasilitas pemerintah menunjukkan perkembangan naik dari tahun 2010 sebesar 4.382.351,6 juta rupiah meningkat menjadi 6.603.387 juta rupiah dan tahun 2012 meningkat menjadi 12.163.499 juta rupiah, namun di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 11.579.827,5 Juta Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi investasi Kabupaten Kudus di tingkat nasional dan internasional.

q. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan ditekankan pada pelestarian budaya lokal dan penggalian budaya-budaya lama yang cenderung tergerus oleh arus modernisasi. Kelompok pelestari seni budaya di Kabupaten Kudus ada beberapa kelompok kesenian yang masih eksis yaitu seni tari jawa 5 kelompok, seni barongan 57 kelompok, wayang purwo 15 kelompok, tari modern 6 kelompok, musik tradisional 10 kelompok, orkes melayu 79 kelompok dan terbang jidur 22 kelompok. Pemerintah Daerah terus berupaya melestarikan budaya lokal di desa-desa melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata sehingga tercipta pelestarian tradisi budaya lokal. Di samping itu, situs Patiayam dan berbagai BCB telah mendapat perhatian dalam peningkatan sarpras dan pengelolaannya, pada tahun 2013 telah dibangun halaman parker dan jalan akses menuju rumah fosil di daerah Situs Patiayam, dan di tahun 2014 direncanakan untuk menambah fasilitas sarana dan prasarana rumah fosil seperti saluran air, talud dan perlengkapan di dalam rumah fosil, replika fosil gajah purba dan rehab gardu pandang. Selain itu, direncanakan untuk dilaksanakan rehab aula taman budaya dan pagar keliling. Diharapkan dengan dilengkapinya fasilitas ini akan dapat menarik wisatawan untuk mengunjunginya.

r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga serta peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal.

Prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional cukup menggembirakan. Namun demikian pembibitan dan pembinaan perlu terus dilakukan guna mendukung capaian prestasi olahraga di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.40.
Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga, dan Gelanggang Olahraga
Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

NO	U R A I A N	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah organisasi pemuda	28	23	23	26
2.	Jumlah organisasi olahraga	28	32	32	36
3.	Jumlah gelanggang olahraga	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan pemuda pada Tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2010, namun untuk kegiatan olah raga mengalami peningkatan dibanding Tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah sarana olah raga diantaranya sarana olah raga futsal sehingga mendorong masyarakat untuk giat berolahraga. Jumlah organisasi pemuda di Tahun 2013 kembali naik menjadi 26 organisasi dan di Tahun 2013 jumlah organisasi olahraga juga mengalami kenaikan menjadi 36 organisasi, sedangkan untuk jumlah gelanggang olahraga cenderung stabil dari Tahun 2010 sampai Tahun 2013 yaitu 5 gelanggang.

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif adalah melalui kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kejahatan, pengembangan wawasan kebangsaan, pemberantasan penyakit masyarakat dan pembinaan kepada anggota linmas. Partisipasi personil Linmas juga sangat diperlukan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat guna membentuk personil Linmas yang handal dan berkualitas. Perkembangan rasio jumlah linmas merupakan indikator kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sebagaimana tertera pada tabel 2.41. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat dalam perlindungan ketertiban lingkungan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2012.

Tabel 2.41.
Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	U r a i a n	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Linmas	5.849	5.111	5.117	5117
2.	Jumlah Penduduk	764.606	769.904	780.051	800.670
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	76,50	66,38	65,59	63,91

Sumber : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Kudus Tahun 2013

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya pengabdian dan kontrol kegiatan di bidang tertentu. Semakin besar jumlah LSM menunjukkan kontrol masyarakat

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meningkat. Berdasarkan tabel 2.42 terlihat, jumlah LSM tahun 2013 berkurang 29 dibandingkan dengan tahun 2012. Diharapkan peran serta LSM sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan atau masyarakat dan sarana komunikasi sosial timbal balik antara anggota dan atau antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, dapat membantu Pemerintah Daerah ikut menciptakan suasana yang kondusif untuk mensukseskan pembangunan.

Tabel 2.42.
Jumlah LSM Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah LSM lokal	71	74	70	41
2.	Jumlah LSM nasional	-	-	-	-
3.	Jumlah LSM asing/internasional	-	-	-	-
4.	Jumlah LSM	71	74	70	41

Sumber : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Kudus Tahun 2013

Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dapat diketahui dari besarnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja. Jumlah Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Kudus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan adanya anggota Polisi Pamong Praja yang pensiun dan mutasi. Untuk itu diharapkan dengan segala keterbatasan mampu memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.

Tabel 2.43.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus
Tahun 2010 - 2013

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	65	72	62	58
2.	Jumlah Penduduk	764.606	769.904	780.051	800.670
3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,8501	0,9351	0,7948	0,7244

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2013

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Pelaksanaan penertiban ini dilaksanakan secara terpadu antara Instansi Pemerintah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi vertikal lainnya. Kegiatan penertiban yang ditangani diantaranya meliputi penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), pemasangan reklame, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), penertiban izin gangguan (HO), Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), Pekerja Seks Komersial, Galian C, minuman keras dan alkohol, pemabuk, pelajar bolos, waria, pengamen, KTP, dan penertiban

lainnya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah. Adapun penegakan Perda tahun 2013 sebanyak 66 kasus, hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012, sebagaimana pada tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Jumlah Penegakan PERDA dan Penyelesaian Penegakan PERDA Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013

NO	U R A I A N	2010	2011	2012	2013
1.	Penegakan PERDA	377	117	137	66
2.	Penyelesaian penegakan PERDA	377	117	137	66

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2013

- t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat melalui berbagai sektor, antara lain : Kinerja DPRD, Jumlah/Data PNS Guru dan Non Guru, Jumlah Desa, RW, RT masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Kudus serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Desa dan pelaksanaan Pilkades, yang disajikan sebagai berikut :
- Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus salah satunya dapat diukur melalui jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang dihasilkan untuk periode Tahun 2010-2013, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.45.

Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010-2013

Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	2	3	4
Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2010 tentang APBD Kab. Kudus TA. 2010	Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kab. Kudus TA. 2011	Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2012 tentang APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2012	Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun	Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Kudus Tahun 2011	Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kudus Nomor 12 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kudus TA. 2010	Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus	Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah
Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2010 tentang Irigasi	Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2012 tentang Garam Konsumsi Beryodium	Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengendalian dan Pengawasan Warung Internet
Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah	Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi
Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2010 tentang Pencabutan beberapa Perda Kab. Kudus tentang Retribusi Daerah selain yang Diatur dalam	Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal	Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta

Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	2	3	4
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi		Kudus Tahun Anggaran 2011	
Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet	Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Kudus
Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2010 tentang Pendidirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kab. Kudus	Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	
Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kudus TA. 2009	Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek	Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus	
Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelaksanaan Alat Pemadam Kebakaran	Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	
Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	

Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	2	3	4
Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah	Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	
Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Perda Kab. Kudus No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran	Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012	
Perda Kab. Kudus No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame	Perda Kab. Kudus No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kab. Kudus TA. 2011	Perda Kab. Kudus No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032	
Perda Kab. Kudus No. 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir			
Perda Kab. Kudus No. 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan			
Perda Kab. Kudus No. 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan			
Perda Kab. Kudus No. 21 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kab. Kudus TA. 2010			

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tahun 2010 Perda yang dihasilkan sebanyak 21 Perda, Tahun 2011 dan tahun 2012 sebanyak 16 Perda, dan Tahun 2013 sebanyak 7 Perda. Banyaknya Perda yang dihasilkan pada Tahun 2010 karena adanya perubahan peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Minimnya Perda yang dihasilkan pada Tahun 2013 disebabkan antara lain tidak tercapainya kuorum anggota DPRD Kabupaten Kudus dalam rapat pembahasan Rancangan Perda Kabupaten Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2013 dan tidak terbahasnya Rancangan Perda Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kabupaten Kudus telah melaksanakan pada Tahun 2013, sedangkan Pemerintah Kabupaten telah memiliki Perda tentang PBB pada 2012 yaitu Perda Kabupaten Kudus No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Mendagri dan Menkeu tentang Tahapan Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis Pajak Daerah pada Tahun 2010.

Di samping itu dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai 1 Januari 2014 dilaksanakan pemungutan Pajak Rokok sebagai Pajak Provinsi dimana Kabupaten/Kota menerima bagi hasil penerimaan pajak rokok sebesar 70 % dari keseluruhan pajak yang diterima Provinsi untuk digunakan sebagai dana pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.

Pada Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 dan 2013, Pemerintah Kabupaten Kudus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dengan catatan pada tahun 2012 Pengelolaan Aset masih diperlukan penyempurnaannya, antara lain pemasangan label, sertifikasi, kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga, identifikasi nilai aset, dan penataan serta validasi neraca aset. Sedangkan catatan pada tahun 2013 adalah : (1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi pengendalian pencatatan aset tetap belum sepenuhnya memadai dan pengendalian kemitraan dengan pihak ketiga tidak memadai, (2) Kepatuhan terhadap peraturan perundangan meliputi biaya langsung non personil pada 43 kegiatan jasa konsultansi belum diperhitungkan secara *ad cost* dan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan.

Langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah secara profesional dan terencana. Peningkatan kualitas SDM aparatur antara lain melalui penyelenggaraan diklat aparatur baik teknis, kepemimpinan maupun fungsional, pengiriman tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan bintek dan kursus keahlian. Perkembangan komposisi

aparatur pada Pemerintahan Kabupaten Kudus tahun 2010-2013 sebagaimana tertera pada tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46.

Rekap Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2010-2013

No	Tahun	Struktural	Fungsional			PNS	CPNS	Jumlah
			Guru	Non Guru	Staf			
1	2010	537	5.239	849	3.358	8.975	1.008	9.983
2	2011	538	5.310	868	3.194	9.642	268	9.910
3	2012	562	5.258	996	2.831	9.647	0	9.647
4	2013	562	5.196	1.042	2.461	9.261	0	9.261

Sumber : BKD Kabupaten Kudus Tahun 2013

Jumlah PNS dan CPNS Tahun 2010-2013 yang terbagi dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dalam tabel di atas. Untuk Jabatan Fungsional terbagi dalam Guru, Non Guru (misal : Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, dan lain-lain) dan Staf. Jumlah keseluruhan pegawai (PNS dan CPNS) tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dibanding jumlah pada tahun 2010 dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun serta tidak adanya penerimaan CPNS di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2013 dilaksanakan penerimaan CPNS sebanyak 50 formasi untuk tenaga pendidikan (guru), namun secara efektif hasil penerimaan CPNS tersebut baru mulai bekerja pada tahun 2014.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan desa dapat memainkan perannya sebagai pelayan masyarakat. Disamping memperoleh dana ADD yang selama ini sudah diterima, Desa nantinya juga mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, sehingga diharapkan program-program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dapat dilaksanakan secara efektif, untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Jumlah Desa/Kelurahan, RT/RW per Kecamatan, ADD Desa dan Bagi Hasil ke Desa merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan jumlah penduduk mendorong peningkatan aktivitas masyarakat sehingga membutuhkan layanan yang meningkat. Hal ini tercermin dari jumlah RT dan RW yang bertambah, jumlah ADD Desa dan bagi hasil desa yang meningkat pula.

Tabel 2.47.

Jumlah Desa/Kelurahan, RW dan RT se-Kabupaten Kudus Tahun 2010-2013

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan				RW				RT			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	Kaliwungu	15	15	15	15	66	67	67	67	441	441	442	442
2	Kota	25	25	25	25	111	110	110	111	495	495	495	496
3	Jati	14	14	14	14	78	78	78	79	375	375	377	381
4	Undaan	16	16	16	16	63	63	63	63	357	357	357	357
5	Mejobo	11	11	11	11	69	69	69	69	341	341	341	341
6	Jekulo	12	12	12	12	85	85	85	85	443	443	443	443
7	Bae	10	10	10	10	51	51	51	51	281	281	285	285
8	Gebog	11	11	11	11	81	81	82	82	432	432	435	435
9	Dawe	18	18	18	18	104	109	109	109	559	577	581	581
	Jumlah	132	132	132	132	708	713	714	716	3724	3743	3756	3761

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013

Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 123 Desa dan 9 Kelurahan, yang masing-masing pembagian Desa/Kelurahan, jumlah RW dan RT per Kecamatan sebagaimana tersebut tabel di atas. Untuk jumlah Desa/Kelurahan sampai tahun 2013 tidak mengalami perubahan, tetapi untuk jumlah RW dan RT setiap tahun mengalami kenaikan. Pada Tahun 2010 jumlah RW sebanyak 708 dan RT sebanyak 3.724 naik menjadi 716 RW dan 3.761 RT pada Tahun 2013. Ini disebabkan jumlah penduduk Kabupaten Kudus yang bertambah, sehingga terjadi pemekaran RW dan RT di wilayah terkait.

Tabel 2.48.

Jumlah ADD Desa dan Bagi Hasil ke Desa Kabupaten Kudus Tahun 2010-2013

No	Tahun	ADD	Bagi Hasil		Bagi Hasil Pasar Desa	Jumlah
			Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah		
1	2010	13.865.000.000	1.965.618.000	240.161.000	312.471.150	16.383.250.150
2	2011	14.042.300.000	2.119.474.000	257.215.000	355.380.950	16.774.369.950
3	2012	19.042.300.000	3.668.775.000	282.937.000	369.567.650	23.363.579.650
4	2013	19.042.300.000	3.668.775.000	311.231.000	438.190.000	23.460.496.000

Sumber : DPPKD Kabupaten Kudus Tahun 2013

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 cenderung terus meningkat dari Rp. 13.865.000.000,-, menjadi Rp.19.042.300.000,-. Demikian pula Bagi Hasil Desa (baik berupa Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pasar Desa) tiap tahunnya cenderung meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas.

Adapun tujuan dari ADD antara lain :

- Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;

- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kudus periode tahun 2010-2013 dapat dilihat di tabel 2.49 berikut. Tahun 2010 dan 2012 di Kabupaten Kudus tidak ada pelaksanaan Pilkades. Sedangkan untuk Tahun 2011 Pilkades dilaksanakan di 1 desa yaitu Desa Golantepus Kecamatan Mejobo. Pada Tahun 2013 Kabupaten Kudus telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa di 116 desa. Namun demikian, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 mengalami penundaan beberapa bulan, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah yang berbarengan/bersamaan dengan masa berakhirnya Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan surat Mendagri tanggal 10 Juli 2012 perihal Penyelenggaraan Pilkades di Daerah dan surat Mendagri tanggal 8 Oktober 2012 perihal Penjelasan Pejabat Kepala Desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Kabupaten Kudus dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2013. Tahun 2014 di Kabupaten Kudus, sesuai rencana akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 5 desa yakni Desa Langgardalem dan Kaliputu Kecamatan Kota, Desa Hadiwarno dan Mejobo Kecamatan Mejobo serta Desa Loram Kulon Kecamatan Jati. Namun sehubungan dengan adanya surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/7635/PMD tanggal 8 November 2013 perihal Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, sehubungan dengan adanya Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 ditiadakan dan akan dilaksanakan pada Tahun 2015.

Pada Tahun 2013 juga telah dilaksanakan pemilihan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di seluruh desa di Kabupaten Kudus periode 2013-2019. Hal ini untuk menggantikan keanggotaan BPD periode 2007-2013 yang berakhir masa jabatannya pada bulan Mei 2013.

Tabel 2.49.

Data Pelaksanaan Pilkades Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013

No	Kecamatan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Kaliwungu	0	0	0	15
2	Kota Kudus	0	0	0	14
3	Jati	0	0	0	13
4	Undaan	0	0	0	16
5	Mejobo	0	1	0	8
6	Jekulo	0	0	0	12
7	Bae	0	0	0	10
8	Gebog	0	0	0	10
9	Dawe	0	0	0	18
Jumlah		0	1	0	116

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kudus Tahun 2013

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka pemerintah daerah selalu mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur, meningkatkan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, yang dukung kondisi yang aman, tentram, tertib dan kondusif.

u. Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Empat aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Kudus pada tahun 2013 sebesar 128.680 ton, yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah sebesar 6.680 ton dan cadangan pangan masyarakat sebesar 122.000 ton. Kebutuhan konsumsi sebesar 72.373 ton dengan asumsi 92,78 kg/kap/th. Dengan demikian terjadi surplus beras sebesar 56.307 ton. Sebagai acuan konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004, untuk konsumsi energi sebesar 2000 kkal/kapita/hr dan protein 52 gram.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kudus, dapat diperoleh gambaran kualitas konsumsi masyarakat sebagaimana Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50.
Angka Kecukupan Energi, Keragaman Konsumsi Pangan Penduduk Tahun 2011 – 2013
Kabupaten Kudus

No	Kelompok Pangan	Angka Kecukupan Energi / Standar Nasional (Kkal/kap/hr)	Angka Kecukupan Energi Kab. Kudus (Kkal/Kpt/hr)			Skor PPH maksimum (%)	Skor PPH Kabupaten Kudus (%)		
			2011	2012	2013		2011	2012	2013
1	Padi-padian	1.000,0	978,9	995,9	862,1	25,0	25,0	25,0	21,6
2	Umbi-umbian	120,0	117,5	119,5	37,5	2,5	0,4	1,1	0,9
3	Pangan Hewani	240,0	234,9	239,0	225,3	24,0	24,0	21,3	22,5
4	Minyak & Lemak	200,0	195,8	199,2	184,8	5,0	5,0	2,8	4,6
5	Buah/Biji berminyak	60,0	58,7	59,8	11,3	1,0	0,8	0,4	0,3
6	Kacang-kacangan	100,0	97,9	99,6	245,2	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	100,0	97,9	99,6	34,8	2,5	2,5	1,8	0,9
8	Sayur dan buah	120,0	117,5	119,5	110,7	30,0	16,4	24,1	27,7
9	Lain-lain	60,0	58,7	59,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	2.000,0	1.957,8	1.991,8	1.712,2	100,0	84,0	86,5	88,5

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Skor PPH Kabupaten Kudus pada tahun 2013 mencapai 88,5 % yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor PPH pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sebesar 84,0 % dan 2012 sebesar 86,5 %. Peningkatan skor PPH tahun 2013 didongkrak oleh meningkatnya konsumsi pangan hewani, minyak dan lemak, dan peningkatan konsumsi sayur dan buah-buahan. Target skor PPH tahun 2015 bagi Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian adalah 90,0 %.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah desa dan kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan dengan melibatkan kader pemberdayaan masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Perkembangan jumlah lembaga dan kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Perkembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus
Tahun 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	132	132	132	132
2	Jumlah Posyandu Aktif	713	713	786	786
3	Jumlah PKK Aktif	14.404	14.404	14.404	14.404
4	Jumlah Pasar Desa	16	16	16	16
5	Jumlah BKM	86	86	86	86

Sumber : *BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2013*

Dari tabel di atas, jumlah lembaga Pemeberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Jumlah PKK Aktif, Jumlah Pasar Desa dan Jumlah BKM cenderung stagnan/tetap dari Tahun 2010-2013, sedangkan untuk Jumlah Posyandu aktif mengalami kenaikan dari Tahun 2010 berjumlah 713 menjadi 786 pada Tahun 2013.

w. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi statistik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai wujud peningkatan pelayanan statistik daerah. Kebutuhan akan data statistik senantiasa di-*update* setiap tahunnya, guna memenuhi informasi statistik yang lebih transparan dan murah, data-data ini telah dipublikasikan melalui web Kabupaten Kudus (*www.kuduskab.go.id*). Adapun penyusunan data statistik Kabupaten Kudus meliputi Kudus Dalam Angka, Sekilas Statistik Kabupaten Kudus, PDRB serta buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia.

x. Urusan Kearsipan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tertib pengarsipan menjadi suatu keharusan, bermanfaat sebagai bukti kegiatan dan merupakan wujud dilaksanakannya akuntabilitas instansi/lembaga. Pengelolaan arsip menjadi tanggungjawab dari seluruh instansi penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan arsip secara baku telah dilaksanakan oleh 44 SKPD di Kabupaten Kudus, sebagaimana pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Indikator	2010	2011	2012	2013
1.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	100	100	100	100
2.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	43	43	44	44
3.	Jumlah SKPD	43	43	44	44

Sumber : *Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013*

y. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dalam indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, website milik pemerintah daerah dan pameran/expo. Rasio wartel/warnet sebanyak 0,234, surat kabar baik terbitan nasional maupun lokal sebanyak 10 jenis. Adapun *website* milik pemerintah daerah telah ada mulai tahun 2008. Sedangkan persentase Satuan Kerja dan Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus yang memiliki *website* Tahun 2010 - 2013 dijelaskan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.53.
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2010 - 2013
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah wartel/warnet	170	180	187	187
2	Jumlah penduduk	764.606	769.904	780.051	800.670
3	Rasio wartel/warnet	0,222	0,234	0,240	0,234

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.54.
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2010 - 2013
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	4	4	4	4
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	4	4	4	6
3	Total jenis surat kabar (1+2)	8	8	8	10

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.55.
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2010 - 2013
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penyiaran radio lokal	6	6	6	6
2	Jumlah penyiaran radio nasional	2	2	2	2
3	Jumlah penyiaran TV lokal	5	5	5	5
4	Jumlah penyiaran TV nasional	11	11	11	11
5	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)	24	24	24	24

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.56.
Persentase Satuan Kerja dan Perangkat Daerah yang Memiliki Website Tahun 2010-2013
Kabupaten Kudus

No	Tahun	Jumlah SKPD	Jumlah SKPD Memiliki <i>Website</i>	Persentase
1.	2010	43	15	34,88
2.	2011	43	15	34,88
3.	2012	44	16	36,36
4.	2013	44	17	38,63

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

Penyebaran informasi Kabupaten Kudus telah dilaksanakan melalui website dan telah dilakukan update tiap tahunnya sehingga tersedia informasi profil terkini. Pembangunan sarana telekomunikasi dan informasi ditujukan untuk mengoptimalkan akses layanan komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat. Aspek komunikasi dan informasi menjadi sebuah modal yang penting dalam pembangunan. Sarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Kudus berkembang cukup pesat. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah tower yang meningkat setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Ketersediaan sarana komunikasi dan informasi dengan biaya yang makin terjangkau akhirnya menciptakan makin terjangkaunya biaya komunikasi dan informasi memudahkan masyarakat untuk cepat dalam menerima segala informasi yang dibutuhkan.

Tabel 2.57.
Perkembangan jumlah Menara Telekomunikasi Bersama
Di Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Tahun	Jumlah
1.	2010	63
2.	2011	79
3.	2012	87
4.	2013	90

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2013

z. Urusan Perpustakaan

Dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan serta untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, peran perpustakaan umum sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan dan penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat.

Tabel 2.58.
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Kudus
Tahun 2010 - 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda)	2	2	2	2
2.	Jumlah Perpustakaan milik non Pemda	120	120	161	161
3.	Total Perpustakaan (1+2)	122	122	163	163

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.59.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Kudus
Tahun 2010 – 2013

No	U r a i a n	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda)	34.500	37.800	26.156	26.827
2.	Jumlah pengunjung Perpustakaan milik non Pemda	1.250	36.000	24.000	25.369
3.	Total Pengunjung Perpustakaan (1+2)	35.750	73.800	50.156	52.196

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.60.
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2010 – 2013
Kabupaten Kudus

No	U r a i a n	2010	2011	2012	2013
1.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,80	0,80	0,82	0,94
2.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	12.784	12.954	16.904	20.839
3.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	15.901	16.127	20.611	25.208

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013

Berdasarkan tabel 2.58 dan 2.59 maka terlihat pada tahun 2013 jumlah perpustakaan non pemerintah masih sama jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. Terlihat juga jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2013 cenderung naik walaupun tidak signifikan dibandingkan tahun 2012, serta ada kecenderungan pengunjung yang datang ke perpustakaan milik pemerintah daerah lebih banyak dibandingkan pengunjung yang datang ke perpustakaan non pemerintah. Untuk meningkatkan referensi telah diupayakan penganekegaran koleksi buku.

2.1.3.2 Fokus Layanan Pilihan

a. Urusan Pertanian

Layanan pilihan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Layanan urusan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan tanaman, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Produksi padi di Kabupaten Kudus mencapai 140.201 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 88.327 ton beras.

Tabel 2.61.
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Padi Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013

No	U r a i a n	2010	2011	2012	2013
1.	Luas tanam padi (Ha)	31.363	24.673	26.186	29.145
2.	Luas panen padi (Ha)	28.719	23.149	25.482	27.012
3.	Produksi padi (Ton)	173.666	124.760	144.534	140.201

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Luas tanam tahun 2013 jika dibandingkan dengan luas tanam tahun 2012 meningkat sebesar 2.959 Ha. Hal ini disebabkan karena musim tanam pertama (MT I) tahun 2012/2013 terjadi pada bulan Januari-Februari tahun 2013 dan MT I 2013/2014 terjadi pada bulan Nopember 2013, sehingga luas tanam terakumulasi pada tahun 2013. Luas panen tahun 2013 jika dibandingkan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1.530 ha. Produksi padi pada tahun 2013 di Kabupaten Kudus mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan terjadinya banjir dan serangan hama tikus.

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kudus adalah jenis tanaman perkebunan rakyat seperti tebu, kapuk, kelapa, kopi dan kapas. Produktivitas tebu tahun 2013 sebesar 194.564,45 ton dengan rendemen 6,74 % untuk gula putih dan 9,5 % untuk gula merah. Luas tanam pada tahun 2013 merupakan penanaman dengan masa panen tahun 2013 dan 2014. Produksi gula merah pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup drastis, hal ini disebabkan kemerosotan harga gula tumbu sehingga banyak petani tebu beralih menanam ketela pohon.

Perkembangan luas tanam dan produksi tebu tercantum pada tabel 2.62.

Tabel 2.62.

Luas Tanam dan Produksi Tebu Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Luas tanam gula putih (Ha)	2.875,00	3.727,60	3.797,80	3.356,05
2.	Luas tanam gula merah (Ha)	4.494,972	3.844,00	2.874,00	3.275,80
3.	Produksi gula putih (Ton)	10.867,50	14.090,33	17.382,80	12.788,53
4.	Produksi gula merah (Ton)	19.316,10	14.545,72	31.951,10	13.620,66

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Peternakan yang berkembang di Kabupaten Kudus adalah ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing) dan unggas. Produksi ternak mengalami peningkatan terutama ternak unggas sebagaimana tercantum pada tabel 2.63.

Tabel 2.63.

Jumlah Ternak Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Sapi (ekor)	7.052	11.339	11.053	10.011
2.	Kerbau (ekor)	2.176	2.692	2.173	1.896
3.	Kambing (ekor)	26.540	22.876	29.881	30.077
4.	Ayam buras (ekor)	290.442	412.841	341.812	386.237

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2013

b. Urusan Kehutanan

Layanan urusan kehutanan dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor 753 Tahun 2012, hutan di Kabupaten Kudus terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat. Hutan negara meliputi hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Kawasan hutan banyak terdapat di Kecamatan Dawe, Gebog dan Jekulo. Luas kawasan hutan sebesar 6.386,7 Ha dan luas lahan kritis sebesar 1.781,0 Ha. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 95,8 Ha. Jenis tanaman hutan yang banyak dibudidayakan adalah jati dan sengon. Penanganan lahan kritis telah dilakukan melalui pembuatan kebun bibit rakyat (KBR), rehabilitasi hutan lahan dan konservasi tanah.

c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan energi dan sumberdaya mineral dibedakan menjadi dua bidang. Bidang energi diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan energi yang dilaksanakan melalui rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan/KWh meter serta pembayaran langganan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), sedangkan sumber daya mineral dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

Tabel 2.64.
Perkembangan LPJU di Kabupaten Kudus

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah LPJU	17.498	17.498	17.818	17.906
2	Biaya Rekening LPJU	13.778.023.995	16.076.703.581	15.950.454.975	15.852.899.434
3	Pendapatan PPJU	13.036.411.970	21.201.208.264	23.496.101.705	27.617.404.940

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Pencapaian pembangunan terkait dengan energi, terlihat dari pencapaian indikator Rasio Elektrifikasi (RE) yang menunjukkan ketersediaan listrik pada semua desa di Kabupaten Kudus. Pembangunan jaringan listrik pedesaan telah dimulai pada Tahun 2011, sedangkan upaya pengembangan energi terbarukan telah dirintis mulai Tahun 2009. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65.
Rasio Elektrifikasi Tingkat Desa, Jaringan Listrik Pedesaan, serta Pengembangan Energi Terbarukan (Biogas) Tahun 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Rasio Elektrifikasi Tingkat Desa (%)	100	100	100	100
2	Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan (desa)	-	2	-	-
3	Pengembangan Demplot Biogas (lokasi)	1	1	-	-

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Sedangkan sumber daya mineral dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan, serta program mitigasi bencana alam tanah longsor melalui pemantauan daerah rawan tanah longsor. Jumlah pertambangan tanpa ijin serta jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang dipantau dijelaskan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Jumlah Pertambangan Tanpa Ijin dan Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam Tanah Longsor Yang Dipantau Tahun 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Pertambangan Tanpa Ijin (lokasi)	3	2	1	-
2	Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam Tanah Longsor Yang Dipantau (Lokasi)	5	5	5	5

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

d. Urusan Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Kudus terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata religi dengan tujuan makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Wisata alam Gunung Muria air terjun Monthel Colo dan hutan pinus Kajar telah dikelola dengan apik oleh swasta. Di samping itu terdapat beberapa obyek tujuan wisata buatan yang dikelola pemerintah maupun swasta antara lain Taman Ria Colo, Taman Krida, Museum Kretek, *Mountain View Residence*, *Waterboom* Lau, dan beberapa wisata budaya di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Tabel berikut ini menginformasikan perkembangan jumlah wisatawan pada berbagai obyek wisata.

Tabel 2.67.
Perkembangan Kunjungan Wisata di Kabupaten Kudus

No	Obyek Wisata	2010	2011	2012	2013
		Pengunjung (Orang)	Pengunjung (Orang)	Pengunjung (Orang)	Pengunjung (Orang)
1.	Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus	240.178	49.242	142.676	259.139
2.	Colo dan Makam Sunan Muria	521.669	682.205	522.899	719.486
3.	Tugu Identitas	10.514	1.717	-	45
4.	Taman Krida Wisata	65.333	54.527	40.967	87.848
5.	Museum Kretek dan Rumah Adat	20.774	79.057	74.181	112.317
6.	Halaman GOR Wergu	55.724	45.267	40.967	87.848
Jumlah		914.192	912.015	821.690	1.266.683

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2013

Dari tabel 2.67 dapat dilihat, bahwa obyek wisata Colo dan makam Sunan Muria menempati posisi teratas berdasarkan jumlah pengunjung dari tahun 2010 sampai dengan 2013, berarti bisa dikatakan obyek wisata Colo dan Makam Sunan Muria merupakan salah satu unggulan obyek wisata Kabupaten Kudus, selanjutnya diikuti wisata Menara Kudus

(Makam Sunan Kudus) dan posisi ketiga Museum Kretek dan Rumah Adat. Peningkatan pengunjung di Museum Kretek dari tahun 2012 ke tahun 2013 juga sangat signifikan yaitu sebesar 51,4% dari 74.181 pengunjung meningkat menjadi 112.317 pengunjung, hal ini disebabkan karena membaiknya sarana prasarana pendukung wisata di tempat tersebut. Obyek wisata Tugu Identitas menempati posisi terakhir. Namun demikian Pemerintah Daerah tetap berupaya semaksimal mungkin agar berbagai obyek wisata yang dikelola dapat menarik wisatawan atau pengunjung lokal maupun nasional, melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan.

e. Urusan Kelautan dan Perikanan

Layanan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan pengembangan budidaya perikanan darat dengan mengembangkan bibit ikan unggul (nila, lele, mas, patin, gurami, kerapu, kakap dan bandeng) dan sarana prasarana produksi perikanan budidaya maupun usaha di bidang perikanan antara lain melalui peningkatan dan pengembangan Unit Perikanan Rakyat (UPR), jaring apung, karamba, dan pembangunan tambak.

Secara keseluruhan, dalam periode tahun 2010 - 2013, produksi usaha perikanan Kabupaten Kudus mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut :

Tabel 2.68.
Produksi Perikanan Tahun 2010 - 2013
Kabupaten Kudus

No.	Jenis Usaha	Produksi (ton)			
		2010	2011	2012	2013
1.	Budidaya air tawar	1.225,79	1.413,82	1.364,99	1.495,53
2.	Perairan Umum	253,89	379,24	405,33	409,94
3.	Pengolahan Ikan	590,25	613,86	655,00	459,50

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Perikanan budidaya terdiri dari tambak, kolam, karamba jaring apung (KJA) dan minapadi. Jenis usaha budidaya ikan air tawar yang dilakukan di Kabupaten Kudus dan paling menguntungkan adalah usaha pembenihan ikan lele, sehingga Kabupaten Kudus tercatat sebagai salah satu sentra produksi benih ikan lele. Lokasi pembenihan lele di Kabupaten Kudus tersebar di 9 kecamatan, akan tetapi yang paling banyak ada di Kecamatan Bae, Jekulo, Kota dan Jati. Selain usaha budidaya ikan juga terdapat usaha pengolahan ikan yang terdiri dari pengasapan, presto, pemindangan dan otak-otak bandeng. Usaha pengolahan ikan yang ada pada saat ini masih bersifat tradisional dengan volume produksi maupun nilai produk olahannya masih relatif kecil.

f. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan diprioritaskan pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta meningkatkan promosi dan kerjasama pemasaran. Layanan urusan perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Di Kabupaten Kudus terdapat 23 pasar yang terdiri dari 5 buah pasar daerah, 17 buah pasar desa dan 1 buah pasar hewan. Pada tahun 2013, Dinas Perdagangan dan pengelolaan pasar memfokuskan pada revitalisasi jaringan listrik pasar kliwon Blok B dan Blok C, rehab bangunan kantor untuk pasar hewan, serta penyelesaian pasar kliwon untuk rencana di tahun 2014, dilaksanakan pembuatan kanopi atas pasar bitingan. Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan pasar tentunya membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pedagang dan jumlah konsumen di pasar-pasar tersebut.

Tabel 2.69.

Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013
(US \$)

No	Komoditi	2010	2011	2012	2013
1	Rokok	16.464.775,0	49.262.344,00	61.253.561,00	64.229.257,00
2	Garmen	-	-	-	-
3	Kertas	21.680.647,18	15.751.118,32	16.467.982,20	13.401.715,57
4	Elektronik	4.979.666,06	3.692.709,59	5.019.917,88	7.943.835,07
5	Furniture	4.108.012,32	5.045.452,22	3.871.951,51	440.251,06
6	Rotan Furniture	9.375.608,53	11.345.342,00	14.701.378,53	755.126,30
7	Sigaret Roller	2.960.077,06	3.779.150,52	2.807.029,38	2.246.559,72
8	Handycraft	-	40.048,70	33.509,20	41.405,70
9	Jenang	20.910,00	25.362,00	15.000,00	2.585,00
10	Playwood/barecore	-	37.448,53	592.113,20	1.309.334,72
11	Furniture stainless	-	-	452.902,27	13.601.073,45
	Total	59.589.696,15	88.941.527,35	105.215.345,17	103.971.143,59
	Jumlah Negara	77	75	89	89

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2013

Untuk Perkembangan nilai ekspor tercatat US \$ 59,58 juta (2010) meningkat menjadi US\$ 103,97 juta (2013), Tiga komoditas ekspor dengan kontribusi yang besar di tahun 2013 berturut-turut adalah rokok (61,79 %), furniture stainless (13 %) dan kertas (12,88 %). Ada peningkatan jumlah negara yang menjadi tujuan ekspor dari 77 negara di tahun 2010 meningkat menjadi 89 negara tujuan.

g. Urusan Industri

Sektor industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian Kabupaten Kudus, pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 61,44 %

terhadap PDRB Kabupaten Kudus. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Pada tahun 2013, di Kabupaten Kudus terdapat 12.810 buah perusahaan industri/unit usaha baik industri besar/sedang maupun industri kecil/rumah tangga. Bila dibandingkan tahun 2010 (10.914 buah) terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 17,37 %. Adapun penyerapan tenaga kerja terbesar di daerah kecamatan Kota sebanyak 137.213 orang, dan terkecil penyerapan tenaga kerja di kecamatan Undaan, hal ini tidak terlepas dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang mana lebih banyak di kecamatan kota daripada di kecamatan-kecamatan yang lain. Namun dari segi nilai produksi tercatat kecamatan Jati sebesar 78.934.740,14 juta rupiah, dan angka ini lebih besar dari pada di kecamatan-kecamatan yang lain, karena kemungkinan ada pusat perusahaan kertas terbesar yaitu PT. Pura. Berturut-turut dari kecamatan yang terbesar kontribusinya dilihat dari nilai produksi adalah kecamatan Jati (59,6%), Kota (23,9 %) dan Bae (5,9 %). Kondisi jumlah industri selengkapnya di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 2.70 dan tabel 2.71 sebagai berikut :

Tabel 2.70.
Jumlah Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja
Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2013

No	Kecamatan	2010		2011		2012		2013	
		Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Kaliwungu	1.528	12.629	1.560	12.860	1.591	13.117	1.830	13.314
2	Kota	1.772	122.991	1.847	134.045	1.902	135.385	2.159	137.213
3	Jati	1.278	22.798	1.346	26.887	1.400	27.425	1.575	27.768
4	Undaan	450	1.921	461	1.985	466	2.025	472	2.028
5	Mejobo	1.656	4.311	1.684	4.493	1.718	4.583	1.804	4.606
6	Jekulo	954	5.258	975	5.373	995	5.480	1.065	5.518
7	Bae	1.078	25.971	1.097	29.557	1.119	30.148	1.270	30.555
8	Gebog	1.023	15.605	1.055	19.534	1.076	19.925	1.237	20.224
9	Dawe	1.175	5.959	1.192	6.120	1.216	6.242	1.398	6.336
	Jumlah	10.914	217.443	11.217	240.854	11.483	244.331	12.810	247.562

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2013

Tabel 2.71.
Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2013

No	Kecamatan	2010		2011		2012		2013	
		Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)
1	Kaliwungu	1.528	5.003.166,00	1.560	5.094.680,39	1.591	5.756.988,84	1.830	6.620.537,17
2	Kota	1.772	22.619.181,00	1.847	24.652.113,77	1.902	27.856.88,56	2.159	31.617.568,52
3	Jati	1.278	54.649.181,00	1.346	62.092.224,30	1.400	70.164.213,46	1.575	78.934.740,14
4	Undaan	450	497.510,00	461	514.085,38	466	580.916,48	472	588.177,94
5	Mejobo	1.656	547.503,00	1.684	570.617,25	1.718	644.797,50	1.804	677.037,38
6	Jekulo	954	825.230,00	975	843.278,95	995	952.905,21	1.065	1.019.608,57
7	Bae	1.078	5.366.404,00	1.097	6.107.380,95	1.119	6.901.340,47	1.270	7.833.021,43
8	Gebog	1.023	2.049.616,00	1.055	2.565.664,30	1.076	2.899.200,66	1.237	3.334.080,76
9	Dawe	1.175	1.220.566,00	1.192	1.253.542,96	1.216	1.416.503,54	1.398	1.628.979,07
	Jumlah	10.914	92.778.357,00	11.217	103.693.588,25	11.483	117.173.754,7	12.810	132.253.750,97

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2013

h. Urusan Ketransmigrasian

Pengiriman calon transmigran sejak tahun 2010 – 2013 mencapai 35 KK. Hal ini terkait dengan kuota yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat yang mendaftar sebagai calon transmigran, serta belum adanya kepastian lokasi daerah calon penerima transmigran karena penentuan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Capaian pengiriman transmigran Kabupaten Kudus tahun 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72.
Capaian Pengiriman Transmigran Kabupaten Kudus Tahun 2010-2013

No	Tahun	Jumlah (KK)	Tujuan
2.	2010	10	UPT Sungai Bulan Kec. Sungai Raya Kab. Kuburaya Prop. Kalimantan Barat
3.	2011	10	UPT Tanjung Aur 2 Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Prop. Bengkulu
4.	2012	10	UPT Teluk Pekedai Kecamatan Teluk Pekedai Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
5.	2013	5	UPT Siong SP.1 Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013

Dari hasil evaluasi dinas terkait, transmigran asal Kabupaten Kudus banyak yang sukses ditempat tinggalnya yang baru, dan permasalahan

tanah di Kabupaten Kuburaya sudah terselesaikan dan menjadi hak milik transmigran.

2.1.4. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Kemampuan ekonomi daerah tercermin dari kemampuan daerah untuk mengelola potensi yang ada dan memasarkan hasil produksinya tersebut sehingga meningkatkan pendapatan. Berdasarkan data BPS, tercatat jumlah perusahaan industri besar dan sedang untuk tahun 2013 sebanyak 168 perusahaan yang menyerap sekitar 83.660 orang. Untuk itu perhatian pemerintah dalam pelayanan kepada sektor industri selalu ditingkatkan sebagai upaya pengurangan pengangguran. Pasar sebagai sarana yang mendorong peningkatan pemasaran di Kabupaten Kudus tersedia sebanyak 23 unit yang terdiri dari 5 pasar daerah, 17 pasar desa, dan 1 pasar hewan.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi hasil pertanian. Kecenderungan NTP di Kabupaten tahun 2010-2013 Kudus menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Perkembangan NTP Kabupaten Kudus tahun 2010-2013 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.73.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Kudus Tahun 2010-2013

No	Tahun	Nilai Tukar Petani
1	2010	103,30
2	2011	103,98
3	2012	104,71
4	2013	105,61

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2013

Infrastruktur jalan merupakan unsur yang menjadi pendorong dan penarik pengembangan suatu wilayah. Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 42.516 ha terdapat jalan nasional 21.180 Km, jalan propinsi 54.939 Km dan jalan kabupaten 621.180 Km. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Kudus pada awal tahun 2014 telah mengakibatkan kerusakan beberapa ruas jalan. Jalan Nasional yang menghubungkan Kudus - Demak macet total akibat tergenang banjir. Langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah mengurug jalan di depan terminal induk Kab. Kudus dengan urugan sirtu ± 4.000 m³ sepanjang 1

km. Terbukti langkah ini telah dapat mengatasi kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalur Kudus - Demak, sedangkan kondisi jalan kabupaten akibat banjir yaitu kondisi baik 31,92 %, sedang 28,32 %, rusak ringan 16,36 %, rusak berat 23,41%.

Iklim investasi merupakan pertimbangan bagi investor dalam rangka penanaman modal. Iklim investasi dapat dilihat dari angka kriminalitas, pelayanan perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, banyaknya demonstrasi, perda yang mendukung usaha. Kabupaten Kudus relatif kondusif sebagai daerah tujuan investasi terlihat dari jumlah demo (politik, ekonomi dan mogok kerja) rata-rata 30 kasus, namun dampaknya terhadap investasi kurang signifikan mengingat investasi tetap meningkat. Adapun angka kriminalitas di Kudus cenderung menurun. Berbagai perda diharapkan pro investasi, namun tetap berpedoman pada undang-undang yang ada. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menjadi daya saing adalah struktur penduduk yang mengarah pada rasio ketergantungan sebagaimana tertera pada tabel 2.74.

Tabel. 2.74.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus Tahun 2010 - 2012

No.	Uraian	2010	2011*	2012*
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	213.832	203.329	207.911
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	35.128	39.651	39.222
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	213.832	242.980	247.133
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	550.774	542.605	544.758
	Rasio Ketergantungan	38,82	44,78	45,37

Sumber : BPS Kabupaten Kudus dan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2013 (data diolah)
Keterangan : * : jumlah penduduk diperbaiki dengan data dasar SP2010

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah rasio perbandingan antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap kelompok penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Rasio ini menyatakan seberapa berat beban tanggungan yang harus dipikul oleh jumlah penduduk usia produktif, dimana rumus *Dependency Ratio* adalah jumlah penduduk usia (0 - 14 tahun) dan usia (65 tahun ke atas) dibagi dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Sejalan dengan komposisi penduduk, angka *Dependency Ratio* Kabupaten Kudus dari tahun 2010 hingga 2012 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah penduduk usia produktif cenderung stabil, berdasarkan data pada tahun 2010 sebanyak 550,774 orang turun menjadi 544,758 orang pada tahun 2012 atau naik 1,09%. Pada tahun 2012, data menggunakan hasil sensus 2010 dan masih bersifat sementara menunjukkan adanya peningkatan Angka *Dependency Ratio*, berarti jumlah beban tanggungan yang harus dipikul per penduduk usia produktif lebih banyak. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan

Jumlah penduduk usia tidak produktif, dimana pada tahun 2010 sebanyak 213,832 orang, pada tahun 2012 menjadi 247,133 orang atau meningkat sebesar 11,65%.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2012/2013 dan Realisasi RPJMD Tahun 2012/2013.

Evaluasi ini mencakup uraian evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah meliputi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2012/2013 dengan realisasi RPJMD tahun 2012/2013. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2012/2013 dan realisasi RPJMD tahun 2012/2013 meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD baik urusan wajib maupun pilihan.

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan urusan dan program RKPD Tahun 2012 dan 2013, dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 2.75 di bawah ini.

2.3. Penelaahan Pokok – pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rumusan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang agenda kerja DPRD tahun 2015.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD masing-masing komisi, dijabarkan dalam Tabel 2.76, 2.77, 2.78 dan 2.79 berikut ini.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan
 - Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan;
 - Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;
 - Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas;
 - Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan
- b. Kesehatan
 - Adanya kecenderungan peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
 - Sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
 - Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Kesehatan yang berkompetensi terhadap pelaksanaan tugas;
 - Masih minimnya anggaran untuk pencapaian target SPM dan MDGs
- c. Pekerjaan Umum
 - Pembangunan infrastruktur yang kurang terarah;
 - Masih terjadinya banjir
- d. Perumahan
 - Masih adanya rumah tidak layak huni;
 - Adanya permukiman rusak akibat bencana alam.
- e. Penataan Ruang

Rendahnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
- f. Perencanaan Pembangunan
 - Belum maksimalnya sinergitas perencanaan pusat dan daerah, pemanfaatan hasil pengendalian dan monitoring evaluasi;
 - Terbatasnya informasi masyarakat terhadap perencanaan kegiatan dari berbagai sumber dana.
- g. Perhubungan
 - Kemacetan pada jam-jam sibuk;
 - Ketersediaan sarpras dan kelaikan sarpras pengaman lalu lintas yang kurang memadai.
- h. Lingkungan Hidup

Kurangnya disiplin dan kesadaran masyarakat dalam usaha /

kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.

i. Pertanian

- Belum optimalnya penyelesaian pengadaan tanah untuk Waduk Logung, dan penyelesaian pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Klumpit. Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan tanah Waduk Logung sebagai berikut :
 - Masih adanya kekurangsesuaian data administrasi dengan kondisi di lapangan terkait pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk Logung;
 - Belum selesainya pembebasan tanah untuk pembangunan waduk Logung karena keterbatasan anggaran;
 - Adanya kendala kesepakatan harga tanah dengan warga dalam pembebasan tanah untuk Waduk Logung.
- Pensertifikatan tanah milik Pemkab di Kelurahan Mlati Norowito sebanyak 5 bidang tidak terealisasi dikarenakan data pelepasan tanah belum selesai;
- Penanganan kasus tanah milik Pemkab di Kecamatan Dawe (tanah yang digunakan untuk Kantor Kecamatan Dawe) dan tanah Pemkab di desa Conge tidak terealisasi (masih dalam tahap penelusuran data tanah);
- Masih adanya tanah-tanah Ex Departemen (Instansi Vertikal) dan dari Pemerintah Provinsi yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, namun status kepemilikannya masih atas nama Ex Departemen dan Pemerintah Provinsi sekitar 55 bidang;
- Buku laporan administrasi pertanahan di Kelurahan Kerjasan tidak terealisasi karena belum ada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

- Belum memadainya pengelolaan administrasi kependudukan;
- Masih adanya masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya data kependudukan.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta konsep kesetaraan gender sehingga masih ditemukannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan pada anak maupun pelanggaran hak anak;
- Belum cukup optimalnya kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam menangani aneka kasus kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak anak;
- Masih minimnya tenaga terlatih untuk fasilitasi kesehatan, rohani, dan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak anak;
- Belum terlembaganya Pengarusutamaan Gender (PUG) di

tengah masyarakat;

- Belum cukup sinkronnya koordinasi antar institusi pemerintah dalam mendukung kebijakan dan anggaran responsif gender dan perlindungan anak;
 - Masih minimnya perhatian dan fasilitasi terhadap aneka usaha ekonomi yang dikelola perempuan;
 - Masih minimnya partisipasi perempuan pada organisasi atau institusi publik di masyarakat.
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- Kurangnya personil Penyuluh Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapang Keluarga Berencana (PKB/PLKB) sehingga belum mencapai angka ideal jika dibandingkan dengan beban kerja jumlah desa/kelurahan yang ada;
 - Semakin sulitnya mencari SDM sukarelawan untuk mendukung program KB di tingkat desa/kelurahan;
 - Sebagian besar pendanaan operasional dan pemenuhan alat kontrasepsi masih menggantungkan pada pemerintah pusat/BKKBN dan peran APBD Pemerintah Kabupaten masih minim.
- m. Sosial
- Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - Kurangnya fasilitasi bagi keluarga miskin;
 - Belum adanya panti singgah.
- n. Ketenagakerjaan
- Belum terpenuhinya kualitas sumber daya manusia guna mendukung kebutuhan pasar kerja.
 - Masih tingginya angka pengangguran.
- o. Koperasi dan UKM
- Masih banyaknya koperasi-koperasi yang tidak beroperasi dengan baik, karena manajemen dan pengelolaannya yang masih rendah;
 - Ketersediaan data yang kurang valid terkait dengan jumlah UMKM yang masih harus dibantu pemerintah.
- p. Penanaman Modal
- Belum optimalnya informasi potensi dan peluang investasi, sehingga ketertarikan investor rendah.
- q. Kebudayaan
- Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan budaya.
- r. Pemuda dan Olahraga
- Belum optimalnya kelembagaan dan kegiatan kepemudaan;
 - Belum optimalnya kelembagaan, kegiatan dan sarana prasarana olahraga;
 - Adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - Belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi;
 - Kurangnya kualitas dan kuantitas aparat pendukung kamtibmas.
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian
 - Belum mantapnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, keseimbangan aparatur teknis dan administrasi, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah;
 - Belum terlaksananya kerjasama antar daerah terkait pelayanan publik.
- u. Urusan Ketahanan Pangan

Belum optimalnya pembinaan karena terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana.
- v. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Pada kegiatan fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri masih terdapat kendala masih adanya kemacetan pengembalian pinjaman tanggung renteng;
 - Pada kegiatan fasilitasi PAMSIMAS terdapat kendala berupa tidak semua desa mampu mengaplikasikan program tersebut dikarenakan faktor geografis seperti wilayah air payau;
 - Sejumlah desa yang pernah mengajukan diri untuk menerima program pemberdayaan masyarakat tertentu tetapi saat memasuki pelaksanaan program menyatakan mundur sehingga menyulitkan pihak fasilitator yakni BPMPKB;
 - Masih cukup rendahnya partisipasi kelompok-kelompok masyarakat dalam mengembangkan teknologi tepat guna, selain itu pada kegiatan skala nasional pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) sering mengalami kerepotan dalam persiapan dikarenakan jadwal dari pemerintah pusat yang senantiasa berubah-ubah;
 - Masih kurang tertibnya administrasi kelompok-kelompok masyarakat yang menerima atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga cukup menyulitkan BPMPKB dalam hal dukungan dokumentasi dan administrasi saat monev;
 - Masih cukup rendahnya tingkat swadaya masyarakat yang turut berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Cukup minimnya sumber daya manusia di tingkat desa/kelurahan yang mau dan mampu berkecimpung dalam sejumlah program pemberdayaan masyarakat.

- w. Statistik
Belum optimalnya ketersediaan data statistic.
- x. Kearsipan
 - Belum tersedianya sistem otomasi kearsipan;
 - Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip dan pemeliharaan sarpras kearsipan belum efektif dan efisien.
- y. Komunikasi dan informatika
 - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - Masih kurangnya sarpras komunikasi dan informasi.
- z. Perpustakaan
 - SDM belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - Minat dan budaya baca masyarakat masih rendah;
 - Keterbatasan literatur, jurnal dan koleksi buku/bahan pustaka.
- aa. Urusan Pertanian
Belum optimalnya produksi pertanian.
- ab. Kehutanan
Belum optimalnya pemanfaatan potensi hutan dan lahan.
- ac. Energi Dan Sumber Daya Mineral
 - Masih rendahnya pemahaman tentang energi terbarukan;
 - Adanya potensi rentan gerakan tanah;
 - Masih adanya kegiatan penambangan tanpa ijin.
- ad. Pariwisata
Belum optimalnya promosi pariwisata sehingga masih rendahnya kunjungan wisatawan baik lokal, nasional maupun internasional.
- ae. Kelautan dan Perikanan
Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan.
- af. Perdagangan
Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam intervensi kebijakan atas ekspansi pasar modern, perlindungan pasar tradisional.
- ag. Industri
 - Keterbatasan kualitas kemampuan SDM terkait dengan perubahan teknologi industri;
 - Masih belum optimalnya pelaksanaan survei dan monitoring terhadap pengembangan industri.
- ah. Ketransmigrasian
Terbatasnya kuota calon transmigran oleh Pemerintah Pusat.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah tahun 2013 dan 2014, tantangan dan prospek ekonomi tahun 2015.

Perekonomian daerah merupakan sub sistem dari perekonomian nasional, dan perekonomian nasional merupakan sub system dari perekonomian global dengan stock, produktivitas dan yield yang berbeda . Adanya Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat sejalan dengan sentimen negatif terhadap rencana *tapering off* (pengurangan stimulus moneter) di USA, berdampak pada *yield* SUN Indonesia, yang tertekan hingga mencapai level 8% ke arah 9%, lebih rendah dari tahun 2012 yang mencapai angka 10-12%. Hal tersebut sebagian besar juga disebabkan oleh berkurangnya capital inflow akibat semakin ketatnya *Quantitative Easing*. Di samping itu, adanya revolusi *shale gas* di USA berdampak pada neraca perdagangan Indonesia yang defisit. Kemampuan ekspor Indonesia tidak akan dapat ditingkatkan karena hal tersebut di luar kendali Indonesia. Sedangkan harga barang komoditas sangat terancam oleh prospektus revolusi *shale gas* di USA. Terlebih adanya larangan ekspor atas beberapa logam antara lain nikel dan bauksit, sehingga membuat neraca perdagangan Indonesia semakin minus. Dari perhitungan didapatkan bahwa pelarangan ekspor atas nikel dan bauksit itu sendiri menyumbang defisit sebesar 0,2%. Kebijakan yang perlu dilaksanakan secara menyeluruh adalah menekan pola konsumsi masyarakat yang kebanyakan merupakan konsumsi barang-barang impor. Cara pertama adalah dengan menaikkan Pajak Penghasilan atas impor sebagaimana secara eksplisit telah terlihat pada PMK-175/PMK.011/2013, bahwa impor baik dengan API maupun tanpa API atas barang-barang tertentu (sebagian besar barang-barang konsumsi), tetap dikenakan tarif 7,5% (sebelumnya impor barang dengan API hanya dikenakan tarif 2,5%. Langkah kedua adalah dengan meningkatkan PPNBM atas impor barang-barang yang tergolong *lux*, misalnya *gadget, smartphone*, dsb. Langkah selanjutnya adalah dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Saat ini rupiah telah berkisar di antara level Rp11.000 hingga Rp12.000, padahal sebelumnya hanya berkisar pada level Rp8.500,-. Diperkirakan rupiah akan terus ditekan hingga mencapai level Rp12.500 pada akhir semester kedua tahun 2014 ini dengan harapan pola konsumsi masyarakat juga dapat ditekan. Kebijakan selanjutnya yang diluncurkan Bank Indonesia adalah penurunan jumlah kredit. Tahun 2013, Bank Indonesia memberikan prediksi pertumbuhan kredit yang digelontorkan sebesar 25%. Akan tetapi pada tahun 2014 ini, Bank Indonesia menurunkan prediksi pertumbuhan kredit menjadi 15%.

Sementara kondisi ekonomi global yang menurun akhirnya mengakibatkan tekanan terhadap Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2013. Defisit transaksi berjalan diperkirakan mencapai 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih tinggi pula dari defisit pada tahun 2012 sebesar 2,8%. Surplus di sisi transaksi modal dan finansial pun menurun. Sampai pertengahan 2013, nilai tukar rupiah masih terus terdepresiasi disertai *volatilitas* (fluktuasi) yang meningkat. Namun pada akhir 2013 kondisi menunjukkan stabilitas ekonomi nasional kembali terkendali. NPI Triwulan IV 2013 membaik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi bulanan menurun dan berada dalam pola normal. Tahun 2014, NPI diperkirakan membaik seiring penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi pada 2014 dan 2015 diperkirakan juga terkendali dalam kisaran $4,5\pm 1\%$ dan $4,0\pm 1\%$. Pertumbuhan ekonomi pada 2014, diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2% sejalan proses konsolidasi ekonomi domestik menuju ke kondisi yang lebih seimbang.

Kondisi ekonomi daerah tahun 2013, angka sementara pertumbuhan ekonomi sebesar 4,83% (yoy). Angka ini merupakan angka yang cukup baik mengingat banyak faktor yang menekan aktivitas ekonomi yaitu adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan TTL listrik untuk 1300 Watt ke atas, sehingga akan berimplikasi pada produktivitas di sektor industri, dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah serta angka inflasi yang lebih tinggi. Berubahnya *life style* masyarakat hingga masyarakat di desa, khususnya pola konsumsi masyarakat yang semakin menjadi-jadi karena banyaknya masyarakat yang mengambil kredit untuk barang konsumsi, misal alat-alat elektronik, kendaraan, barang gadget, pakaian, dsb.) semakin meningkatkan impor. Jika konsumsi Indonesia tidak ditekan, impor negara Indonesia tidak akan sanggup mengimbangi ekspor dan pada akhirnya defisit neraca perdagangan akan semakin besar. Akan tetapi, di tengah faktor penekan ekonomi daerah tersebut pada tahun 2013, situasi daerah daerah cukup kondusif sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya. Di samping itu, adanya event Pemilu Gubernur Jawa Tengah, Pemilu Bupati Kudus, dan Pemilu Kepala Desa serta peningkatan UMR juga dapat menjadi stimulus untuk konsumsi dalam negeri. Kenaikan suku bunga pada level 8% akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. bisa menjadi katalis positif bagi konsumsi dalam negeri, produktivitas industri, tenaga kerja, serta membawa harapan baru bagi investor untuk kembali menanamkan modalnya di Kabupaten Kudus.

Pada awal 2014, kondisi meluasnya banjir yang hampir merata di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Kudus, membuat barang-barang konsumsi semakin langka sehingga mendorong inflasi tinggi. Banjir yang surut, mobilitas orang dan barang kembali normal sehingga inflasi turun. Namun, pasca banjir yang meluas mengakibatkan banyak infrastruktur yang rusak. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kudus akan

fokus alokasikan anggaran untuk belanja infrastruktur sehingga akses pasar bisa lebih baik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan kondisi ekonomi 2013 dan prospek ekonomi tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada berbagai indikator makro ekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat inflasi, pendapatan perkapita dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013, angkanya berkisar 6,8 % dan 2014 ditargetkan 6,4%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 diperkirakan 5,8%-6,2% dan 2014 diprediksikan 5,9% - 6,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2013 berkisar 4,83 % dan 2014 ditargetkan 5,13%. Perkuatan infrastruktur ekonomi terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.

Realisasi investasi Kabupaten Kudus tahun 2013 mencapai Rp.11.579.827.503.311,-. Kabupaten Kudus merupakan lokasi yang menarik untuk berinvestasi antara lain industri, perdagangan dan restoran, perumahan, jasa keuangan, transportasi, dan komunikasi. Investasi ini tidak lepas dari peningkatan investasi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur sehingga meningkatkan daya saing ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan pelayanan perijinan dan penyebaran peluang investasi semakin mendorong calon wirausaha dan investor untuk mengembangkan usahanya.

Inflasi Kabupaten Kudus tahun 2013 sebesar 8,31 %, lebih tinggi dari inflasi tahun 2012 sebesar 4,77 %. Meningkatnya angka inflasi disebabkan oleh peningkatan harga pada komoditas *volatile foods* antara lain beras, daging, bawang merah, bawang putih, telur, dan cabe. Awal tahun 2014, bencana banjir hingga 3 pekan menjadikan perekonomian daerah terisolasi dan barang-barang menjadi langka serta mahal. Pada bulan April dan bulan September dilaksanakan Pemilu legislative dan pemilu presiden, tentunya akan mendorong peningkatan jumlah uang. Secara signifikan akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa secara luas. Efek pergeseran permintaan yang tidak dapat diikuti peningkatan jumlah barang akan mendorong inflasi.

Berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin baik melalui layanan kesehatan, pendidikan dasar, perumahan, pengembangan ekonomi produktif, dan terjaganya stabilisasi harga pangan dan barang strategis lainnya di berbagai tingkatan, dapat mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2011 mencapai 73.591 orang atau 9,45 % dan pada tahun 2012 mencapai 68.100 orang atau 8,6% , sehingga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 sebesar 5.491 orang. Garis kemiskinan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 277.382,- per kapita per bulan dan pada tahun 2013 seiring dengan angka inflasi, garis kemiskinan diperkirakan sebesar Rp.305.120,- per kapita per

bulan dan pada tahun 2013 kemiskinan diprediksikan menurun menjadi 57.706 orang atau 7,2%.

Pada tahun 2012 jumlah penganggur di Kabupaten Kudus tercatat 25.522 orang atau 5,85% dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 menurut BPS meningkat menjadi 8,01%. Berbagai program pelatihan ketrampilan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sehingga bisa masuk ke pasar kerja. Namun untuk situasi industri besar yang relatif padat modal, peningkatan pertumbuhan produksi kurang elastis terhadap penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, adanya pengurangan lahan pertanian memunculkan angka pengangguran dari pengangguran tersembunyi menjadi masuk pengangguran terbuka.

Rona pergerakan perekonomian daerah secara rinci dapat diamati pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kudus

No.	Indikator Makro	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	2	3	4	5	6
1.	PDRB				
	ADH Konstan (juta Rp)	13.754.585,17	14.418.931,65	15.158.622,83	15.972.640,87
	ADH Berlaku (juta Rp)	36.959.414,03	40.433.598,95	44.234.357,25	48.348.152,47
	Kontribusi Sektoral (Berdasarkan ADH Berlaku)				
	Pertanian	1.079.747,16 2,92 %	1.181.243,39 2,92%	1.292.280,27 2,92 %	1.368.252,72 2,83%
	Pertambangan dan penggalian	10.892,68 0,03 %	11.916,59 0,03%	13.036,75 0,03%	14.504,45 0,03%
	Industri pengolahan	22.707.038,41 61,44 %	14.841.500,02 61,44 %	27.176.601,02 61,44%	29.845.314,52 61,73%
	Listrik, gas, air bersih	164.122,38 0,44 %	179.549,88 0,44 %	196.427,57 0,44%	212.731,87 0,44%
	Konstruksi	602.878,24 1,63 %	659.548,79 1,63 %	721.546,38 1,63%	788.074,89 1,63%
	Perdagangan, hotel dan restoran	9.931.325,42 26,87 %	10.864.870,01 26,87 %	11.886.167,79 26,87%	12.966.974,49 26,82%
	Pengangkutan dan Komunikasi	507.120,43 1,37 %	554.789,75 1,37 %	606.939,99 1,37%	652.700,06 1,35%
	Keuangan, persewaan, jasa	899.966,80 2,44 %	984.563,68 2,44 %	1.077.112,67 2,44%	1.160.355,66 2,40%
	Jasa-jasa	1.056.322,51 2,86 %	1.155.616,83 2,86 %	1.264.244,81 2,86%	1.339.243,82 2,77%
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan tahun tertentu	4,33 %	4,83 %	5,13 %	5,37%
3.	Tingkat Inflasi	3,34 %	4,77 %	6-7 %	5±1%

No.	Indikator Makro	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	2	3	4	5	6
4.	Jumlah Penduduk Miskin	68.100	57.706	50.637	43.568
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,85	5,75	5,7	5,65
6.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:				
7.	PDRB Perkapita (juta Rupiah)	47,826	50,227	53,114	54,007
8.	Investasi Riil (Juta Rupiah)	12.163.499	11.579.827	8.070.000	8.877.000
9.	ICOR	3,5	3,5	3,5	3,5
10.	Besaran Indeks Gini (<i>Gini Ratio Index</i>)	0,338	-	-	
11.	Indeks Williamson	0,906	-	-	
12.	Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	72,65	72,70	72,75	

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2012 mencapai Rp.13.754.585,17 juta, tahun 2013 sebesar Rp. 14.418.931,65 juta dan pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 15.158.622,82 juta. Adapun PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp. 36.959.414,03 juta, tahun 2013 sebesar Rp. 40.433.598,95 juta dan pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 44.234.357,25 juta. Kondisi ini menggambarkan bahwa tahun 2013 perekonomian daerah meningkat meskipun banyak diliputi tekanan perekonomian global dan nasional.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Kudus didorong oleh peningkatan sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, masing-masing memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 61,44 % dan 26,87 % pada tahun 2013. Sektor-sektor lain yang berkembang adalah sektor bangunan, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan sektor komunikasi. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2012 mencapai 2,92 % dan pada tahun 2013 diperkirakan tetap. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat sektor ini mempunyai kedudukan strategis, karena untuk mendukung ketahanan pangan, dan menjadi penyerap tenaga kerja di pedesaan. Penguatan sektor moneter melalui pengendalian suku bunga SBI, diikuti penurunan bunga pinjaman dan *yield* obligasi namun terjadi tekanan pada rupiah terhadap dollar dan *volatilitas* yang tinggi dalam bursa saham, mengakibatkan keuntungan sektor keuangan dan perbankan tetap bahkan cenderung berkurang.

Investasi swasta dipengaruhi kondisi ekonomi nasional dan regional, lokasi, dan peraturan yang mendukung investasi. Semakin baik kondisi sarana prasarana daerah penunjang investasi dan kebijakan pemerintah

yang pro investasi maka akan menjadi daya tarik investasi. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) merupakan suatu angka yang menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan apabila ingin mencapai pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa ICOR Kabupaten Kudus 3,5% artinya untuk menaikkan PDRB Rp. 1,- dibutuhkan investasi sebesar Rp. 3,5,-. Semakin baik kondisi sarana prasarana pendukung investasi, maka angka ICOR menurun artinya semakin kecil investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. Pada tahun 2012, tercatat Rp. 12.163.499.070.000,- dan tahun 2013 sebesar Rp.11.579.827.503.311. Dengan asumsi hal-hal lain tetap (*ceteris paribus*), untuk mewujudkan tercapainya pertumbuhan 5,13 % dibutuhkan investasi sebesar 17,96 % dari PDRB tahun 2013 yaitu Rp. 7.259.852.690.000,-. Kemampuan APBD tahun 2014 sebesar Rp.1.517.236.814.000,-, dana APBN sebesar Rp.16.841.526.000,- sehingga dibutuhkan investasi swasta sebesar Rp. 5.725.774.351.000,-.

Indeks gini menunjukkan kesenjangan pendapatan di antara kelompok masyarakat. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2012 diketahui Indeks Gini sebesar 0,338. Hal ini menunjukkan disparitas pendapatan antara kelompok kaya dan miskin tidak terlalu tajam, artinya pendapatan penduduk dapat dikatakan merata, namun perlu diwaspadai, bahwa pemerintah harus meningkatkan fungsinya untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Sedangkan dari sisi pemerataan pembangunan wilayah (antar kecamatan) dapat diketahui dari Indeks Williamson tahun 2012, sebesar 0,906 yang berarti disparitas antar wilayah kecamatan cenderung tinggi, artinya terdapat perbedaan yang mencolok antara perkotaan dan perdesaan. Meskipun hal ini dipengaruhi potensi wilayah, untuk mengurangi disparitas antar wilayah ini diperbaiki dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber daya yang ada.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur melalui perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini mencakup tiga dimensi mendasar, yaitu aspek Kesehatan yang tercermin dari usia harapan hidup, aspek pendidikan /pengetahuan yang dicerminkan dari angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah, serta standar hidup yang layak tercermin dari konsumsi riil per kapita. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus tahun 2012 mencapai 72,7 dan pada tahun 2013 diprediksikan meningkat menjadi 72,75.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi tahun 2015

Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi potensi dan kebijakan pemerintah atasan. Sejalan dengan kondisi tersebut, beberapa hal yang menjadi tantangan perekonomian daerah adalah :

- Berlakunya pasar bebas *Asean China Free Trade Area* (ACFTA) tahun 2010, *Asean Economy Community* (AEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015;

- Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat;
- Dampak pengurangan subsidi BBM;
- Dampak terjadinya bencana alam ;
- Koordinasi pembangunan antar sektor yang kurang optimal;
- Adanya tuntutan buruh tentang jaminan pensiun, kesehatan dan komponen acuan survei kehidupan hidup layak;
- Meningkatnya *life style* masyarakat dalam pola konsumsi barang impor;
- Meningkatnya perkembangan kota dengan aktivitasnya menuntut penataan dan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas yang memadai.
- Meningkatnya dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan industri.

Prospek ekonomi tahun 2015, relatif kondusif bila sentimen masyarakat positif dan tidak berlebihan. Pada tahun 2015, merupakan tahun kedua pada kepemimpinan Bupati Kudus periode 2013-2018, dan kemungkinan terjadi perubahan/pergeseran institusi, pergeseran sasaran pembangunan dan perubahan agenda. Pemerintah provinsi juga melaksanakan pemilu 2013, implikasinya tahun 2015 dimungkinkan pula ada perubahan sasaran pembangunan. Di samping itu pada tahun 2015, telah dilaksanakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden, tentunya akan mempengaruhi kebijakan daerah melalui fungsi-fungsi pada institusi pemerintahan Pusat. Kebijakan - kebijakan politis akan menggeser fokus dan lokus sasaran kebijakan. Selain itu, perdagangan bebas China-ASEAN (ACFTA) yang semakin gencar, mengakibatkan produk-produk impor menyerbu pasar lokal bahkan sudah membaaur dengan harga yang sangat bersaing. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), disepakati adanya 12 sektor usaha yang diliberalisasi yaitu 7 perdagangan ekspor impor yang berbasis pertanian, elektronik, perikanan, karet, tekstil, otomotif, kayu, dan lima 5 produk jasa bidang transportasi udara, pelayanan kesehatan, turisme, e-ASEAN, dan jasa logistik. Namun demikian hal tersebut juga menjadi peluang bila kita dapat memanfaatkannya antara lain dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap mengacu standar yang ditentukan, khususnya produk-produk unggulan daerah hingga mampu bersaing di luar negeri. Dari 12 sektor di atas yang telah disepakati aspek standarisasinya yaitu otomotif, kesehatan, elektronik, karet, kayu, dan produk agrikultur. Diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia merupakan yang potensial menjadi pangsa pasar. Suatu pilihan produksi atau perdagangan menjadi strategi dalam menggerakkan perekonomian daerah.

3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

RKPD disusun dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD.

Agar anggaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka perlu adanya arah dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penentuan arah dan kebijakan keuangan daerah, RKPD tahun 2015 perlu memperhatikan situasi dan kondisi saat ini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Baik kondisi perekonomian maupun regulasi, yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Uraian berikut ini merupakan evaluasi atas perhitungan kapasitas fiskal daerah.

Sebagai gambaran kapasitas fiskal daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 yang menginformasikan realisasi pendapatan tahun 2012 dan 2013, target pendapatan 2014 dan rata-rata pertumbuhan pendapatan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam tahun anggaran 2012 - 2014 rata-rata pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 15,54 % yang terdiri dari Dana perimbangan rata-rata meningkat 10,74 %, PAD rata-rata meningkat 17,97 % dan Lain-lain pendapatan yang sah rata - rata meningkat 30,44 %.

Lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun fluktuatif karena plafond Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dipengaruhi karena pada tahun 2014 terdapat dana darurat untuk penanganan bencana dan terdapat dana bagi hasil pajak provinsi yaitu pajak rokok. Hal yang perlu diperhatikan penggunaan tambahan pendapatan tersebut yang spesifik.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kudus

No.	Uraian	(n-2)	(n-1)*	(n-1)**	Rata-rata Pertumb
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.147.302.763.565	1.386.155.584.659	1.517.236.814.000	15,54
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	121.017.026.873	144.967.592.035	168.382.095.000	17,97
1.1.1	Pajak Daerah	38.572.029.915	58.209.756.519	56.772.180.000	36,01
1.1.2	Retribusi Daerah	13.865.924.782	15.588.523.244	35.236.083.000	69,23
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	4.633.796.307	4.318.220.147	4.723.796.000	8,20
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	63.945.275.869	66.851.092.125	71.630.036.000	5,85
1.2.	Dana Perimbangan	825.555.159.520	954.512.784.776	1.010.417.213.000	10,74
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	129.593.027.520	182.896.776.000	159.376.462.000	30,47
1.2.2	Dana Alokasi Umum	637.615.372.000	719.406.935.000	795.851.851.000	11,73
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	58.346.760.000	52.208.880.000	55.188.900.000	8,46
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	200.730.577.172	286.675.207.848	338.437.506.000	30,44

No.	Uraian	(n-2)	(n-1)*	(n-1)**	Rata-rata Pertumb
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	(%)
1.3.1	Hibah	-	1.076.193.701	6.426.400.000	
1.3.1	Dana Darurat			59.225.259.000	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	66.106.734.172	74.958.695.147	196.228.110.000	87,59
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	88.545.748.000	146.439.054.000	76.557.737.000	57,24
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.078.095.000	64.201.265.000	64.201.265.000	19,67

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Prediksi kapasitas keuangan daerah tahun 2015 merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Prediksi ini dengan mengasumsikan pendapatan DAU tahun 2015 meningkat 7,43 %, pajak daerah meningkat 27% dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan meningkat 27%. Formula DAU ditentukan oleh Alokasi dasar ditambah celah fiskal yang merupakan selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Bila diperbandingkan tabel 3.2 dan 3.3 maka terlihat bahwa rata-rata pendapatan dalam tahun 2012-2014 meningkat 15,54 % dan tahun 2015 naik 8,01% atau sebesar Rp. 121.471.666.000,- dibandingkan APBD 2014.

Tahun 2012 - 2014 DAU mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,73% namun untuk tahun 2015 diprediksikan naik 7,43%. Retribusi daerah pada tahun 2012-2014 realisasinya fluktuatif dengan rata-rata 69,23%, dan tahun 2015 ditargetkan naik 6% dibandingkan tahun 2014. Adapun bagi hasil pajak / bukan pajak pada tahun 2012-2014 rata-rata meningkat 30,47% dan pada tahun 2015 diprediksikan meningkat 9,18% dibanding tahun 2014. Dana penyesuaian dan otonomi khusus diperuntukan bagi sertifikasi guru sehingga tiap tahun diprediksikan meningkat, pada tahun 2015 diprediksikan meningkat 125%. Angka pada APBD 2014 merupakan angka penetapan, dan pada perubahan akan ada penghitungan kekurangan dana sertifikasi guru. Adapun angka prediksi yang meningkat 125% tersebut dengan asumsi sudah memperhitungkan total dana sertifikasi guru.

Tabel 3.3
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2015
Kabupaten Kudus

No	Uraian	Proyeksi RPJMD (2015)	Proyeksi RKPD tahun 2015 (Rp)
1	PENDAPATAN	1.688.766.325.000	1.638.708.480.000
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	199.045.843.000	195.520.235.000
	Pajak Daerah	72.100.668.000	72.100.668.000
	Retribusi Daerah	38.781.691.000	35.256.083.000
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.999.220.000	5.999.220.000
	Lain-Lain PAD yang sah	82.164.264.000	82.164.264.000
1.2.	Dana Perimbangan	1.082.001.012.000	1.084.166.271.000
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	171.845.285.000	174.010.544.000
	Dana Alokasi Umum	854.966.827.000	854.966.827.000
	Dana Alokasi Khusus	55.188.900.000	55.188.900.000
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	407.719.470.000	359.021.974.000
	Hibah	7.390.360.000	7.390.360.000
	Dana Darurat	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	98.109.047.000	102.768.119.000
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	225.662.326.000	172.305.758.000
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	76.557.737.000	76.557.737.000
	Total Pendapatan (a)	1.688.766.325.000	1.688.766.325.000
2	Pencairan Dana Cadangan (b)	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	33.414.482.000	33.414.482.000
	Saldo kas neraca daerah		
	Dikurangi:		
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	115.000.000	115.000.000
	Jumlah (c)		
	Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)	1.688.766.325.000	1.638.708.480.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Kebutuhan Fiskal dapat dilihat dari alokasi belanja yang terbagi dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perkembangan belanja tidak langsung selama tahun 2012 - 2014 terangkum dalam tabel 3.4, dimana tahun 2012 dan 2013 merupakan angka realisasi sedangkan tahun 2014 merupakan angka target. Belanja tidak langsung tahun 2012 - 2014 rata-rata meningkat 18,16%, dimana dominasi belanja pegawai rata-rata meningkat 18,76%. Belanja bunga dianggarkan sesuai kebutuhan sehingga fluktuatif. Pada tahun 2012 - 2014 belanja hibah fluktuatif, dimana pada tahun 2013 banyak anggaran hibah yang berdasarkan evaluasi Gubernur tidak diperkenankan dan pada tahun 2014 diberikan. Adapun realisasi belanja hibah tahun 2012 dan 2013 sesuai proposal. Kebijakan keuangan untuk hibah dan bansos telah diatur melalui Permendagri 32 tahun 2011,

yang memberi pedoman lebih rinci sejak KUA, sehingga lebih transparan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menghitung belanja wajib mengikat yang terakumulasi dalam belanja tidak langsung.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Kabupaten Kudus

No.	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Rerata Pertumb (%)
1.	Belanja Pegawai	580.192.246.240	647.389.397.621	815.347.426.000	18,76
2.	Belanja Bunga	1.054.653.530	44.378.263	70.802.000	79.75
3.	Belanja Subsidi	-			
4.	Belanja Hibah	38.878.555.008	25.607.571.733	46.029.515.000	61.34
5.	Belanja Bantuan Sosial	26.663.285.000	24.098.658.500	32.371.987.000	25.21
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	4.321.279.650	4.319.038.625	6.181.567.000	30.49
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	30.919.776.850	37.271.465.261	44.812.104.000	20.39
8.	Belanja Tidak Terduga	1.870.960.500	3.991.500	3.000.000.000	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	683.900.756.778	738.734.501.503	947.813.401.000	18.16

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi. Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tahun 2011 - 2013 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5. Dari tabel neraca dapat dicari rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Pada tahun 2011 - 2013 rasio likuiditas didapat 114,81 meningkat menjadi 157,28 dan menurun menjadi 48,13. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan kas Pemerintah daerah cukup kuat untuk *menbackup* kewajiban jangka pendek. Kondisi akhir tahun 2013 diketahui bahwa aset lancar meningkat 138,67% dibandingkan tahun 2012. Adapun rasio solvabilitas pada tahun 2011 sebesar 0,00067 tahun 2012 menurun menjadi 0,00039 dan tahun 2013 meningkat menjadi 0,0021. Kondisi ini menunjukkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan hutang yang cukup signifikan, meskipun demikian masih dalam posisi aman. Untuk aset tetap mengalami peningkatan sebesar 20,02% dimana semua komponen aset tetap mengalami peningkatan. Adapun aset lainnya mengalami peningkatan 16,15 % didominasi peningkatan aset lain-lain yang meningkat sebesar 39,7%. Sedangkan kewajiban jangka panjang menurun 37,52%. Selisih antara aset dengan kewajiban diperoleh jumlah ekuitas, yang meningkat sebesar 23,40

%. Ekuitas yang terbesar berbentuk aset dana investasi yang berbentuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi.

Tabel 3.5.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kudus

No.	Uraian	2011	2012	2013	Rata-rata Pertumb
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.	ASET				
1.1.	ASET LANCAR	124,853,522,193.31	148,015,734,652.17	352,379,924,515.36	78.31
1.1.1.	Kas	112,196,229,951.90	98,122,672,531.35	325,129,037,121.32	109.40
1.1.2.	Piutang	3,004,431,894.00	9,530,727,814.00	13,316,153,881.00	128.47
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	
1.1.3.	Persediaan	9,172,617,196.41	39,755,419,233.82	13,433,587,176.04	240.37
	Biaya Dibayar Dimuka	480,243,151.00	606,915,073.00	501,146,337.00	22.35
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	45,064,578,669.69	51,325,529,517.21	59,481,217,903.90	14.89
1.2.1	Investasi Non Permanen	2,181,790,578.00	1,543,874,415.00	1,597,275,773.50	20.82
1.2.2	Investasi Permanen	42,882,788,091.69	49,781,655,102.21	57,883,942,130.40	16.18
1.3	ASET TETAP	2,019,770,108,758.20	2,312,628,891,475.54	2,903,100,739,356.54	20.02
1.2.1.	Tanah	416,408,982,000.00	416,231,341,000.00	860,876,339,330.00	75.54
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	326,267,371,651.96	353,552,594,194.00	380,233,365,426.00	7.95
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	619,524,712,453.22	764,764,479,037.78	854,070,543,915.78	17.56
1.2.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	621,577,964,244.02	720,596,662,699.76	759,338,106,361.76	10.65
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	34,809,259,809.00	41,547,991,359.00	46,921,809,081.00	16.15
1.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,181,818,600.00	15,935,823,185.00	1,660,575,242.00	885.03
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	
1.4	ASET LAINNYA	64,058,439,930.04	84,909,265,645.78	107,067,910,045.78	29.32
1.3.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	
1.3.2.	Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	
1.3.3.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	17,425,643,800.00	17,425,643,800.00	17,425,643,800.00	
1.3.4.	Aset Tak Berwujud	3,036,861,453.00	3,435,678,453.00	4,795,525,276.00	26.36
1.3.5.	Aset Lain-lain	43,588,234,677.04	64,040,243,392.78	84,839,040,969.78	39.70

No.	Uraian	2011	2012	2013	Rata-rata Pertumb
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	JUMLAH ASET DAERAH	2,253,746,649,551.24	2,596,879,421,290.70	3,422,029,791,821.58	23.50
2.	KEWAJIBAN				
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,007,586,586.66	688,335,869.02	7,041,984,029.31	653.08
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	244,662,235.00	7,970,639.00	-	(96.74)
2.1.2.	Utang Bunga	139,664.62	538,286.69	-	285.41
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	170,626,148.04	156,997,713.33	143,517,012.31	(8.29)
2.1.1.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	
2.1.2.	Utang Jangka Pendek Lainnya	592,158,539.00	522,829,230.00	6,898,467,017.00	862.32
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	490,527,779.78	333,530,066.45	190,013,054.14	(37.52)
	Utang Pemerintah Pusat	490,527,779.78	333,530,066.45	190,013,054.14	(37.52)
	Utang Luar Negeri	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	1,498,114,366.44	1,021,865,935.47	7,231,997,083.45	430.31
3.	EKUITAS DANA				
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	123,845,935,606.65	147,327,398,783.15	345,337,940,486.05	76.68
3.1.1.	SILPA	111,906,188,338.79	97,992,823,310.79	323,862,134,884.00	163.22
3.1.2.	Cadangan Piutang	3,484,675,045.00	9,530,727,814.00	13,316,153,881.00	106.61
3.1.3.	Cadangan Persediaan	9,172,617,196.41	39,755,419,233.82	13,433,587,176.04	240.36
3.1.4.	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(762,924,351.66)	(680,365,230.02)	(7,041,984,029.31)	661.21
3.1.6.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	45,379,378.11	121,878,581.56	1,266,902,237.32	554.03
3.1.5.	Cadangan Untuk Biaya Dibayar Dimuka	-	606,915,073.00	501,146,337.00	(17.43)
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	2,128,402,599,578.15	2,448,530,156,572.08	3,069,459,854,252.08	20.20
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	45,064,578,669.69	51,325,529,517.21	59,481,217,903.90	14.89

No.	Uraian	2011	2012	2013	Rata-rata Pertumb
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset tetap	2,019,770,108,758.20	2,312,628,891,475.54	2,903,100,739,356.54	20.20
3.2.3.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	64,058,439,930.04	84,909,265,645.78	107,067,910,045.78	29.32
3.2.4.	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(490,527,779.78)	(333,530,066.45)	(190,013,054.14)	(37.52)
	JUMLAH EKUITAS DANA	2,252,248,535,184.80	2,595,857,555,355.23	3,414,797,794,738.13	23.40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,253,746,649,551.24	2,596,879,421,290.70	3,422,029,791,821.58	23.50

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.

Dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian secara riil, perubahan regulasi yang ada dan realisasi pendapatan tahun 2013 dan target pendapatan 2014, maka rencana pendapatan di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 121.471.666.000,- dari target pendapatan tahun 2014.

Dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya dan perkembangan kondisi perekonomian daerah, dapat dilakukan proyeksi pendapatan tahun 2015 sebagaimana tercantum pada tabel 3.6 dengan analisis berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi daerah yang dominan adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pasar, retribusi obyek wisata colo, dan retribusi ijin mendirikan bangunan. Adapun pajak daerah yang dominan adalah pajak reklame dan bea perolehan hak tanah dan bangunan. Secara umum, PAD dipengaruhi oleh tarif, obyek pajak dan retribusi, biaya operasional, dan kondisi perekonomian daerah. Meskipun dipahami bahwa tiap tahun, nilai uang akan mengalami penurunan seiring dengan angka inflasi. Pada tahun 2012 dibahas 8 retribusi dan 2 pajak daerah. Penyesuaian ini akan meningkatkan pendapatan daerah pada tahun berikutnya. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 diprediksikan meningkat 16,12% dari Rp. 168.382.095.000,- menjadi Rp. 195.520.235.000,-.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DAU yang merupakan sumber pendapatan dominan pada tahun 2014 mengalami peningkatan relatif tinggi sebesar 10,63%, pada tahun 2015 meningkat 7,43 % dari Rp. 795.851.851.000,- menjadi Rp. 854.966.827.000,-. Angka 7,43 % merupakan prediksi yang sangat hati-hati, karena adanya daerah pemekaran yang mengakibatkan pembagi DAU menjadi lebih banyak.

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2015 diprediksikan meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Komponen yang meningkat ini adalah pendapatan dana penyesuaian untuk sertifikasi guru sehingga sifatnya administrasi saja. Pada dana bagi hasil pajak dari provinsi terdapat sumber pendapatan baru yaitu pajak rokok yang berkisar Rp.30.000.000.000,- sehingga bila dibandingkan pendapatan tahun 2014 terdapat kenaikan yang mencapai 65,65%.

Tabel 3.6
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 s.d Tahun 2015

No	Uraian	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Target Tahun 2014	Proyeksi / Target Tahun 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan asli daerah	108,458,832,665	121,017,026,873	144.967.592.035	168.382.092.000	195.520.235.000
1.1.1	Pajak daerah	36,687,744,537	38,572,029,915	58.209.756.519	56.772.180.000	72.100.668.000
1.1.2	Retribusi daerah	54,599,118,519	13,865,924,782	15.588.523.244	35.256.083.000	35.256.083.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4,619,012,799	4,633,796,307	4.318.220.147	4.723.796.000	5.999.220.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang	12,552,956,810	63,945,2785,869	66.851.092.125	71.630.036.000	82.164.264.000
1.2	Dana perimbangan	669,997,974,734	825,555,159,520	954.512.784.000	1.010.417.213.000	1.084.166.271.000
1.2.1	Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	142,856,882,734	142,856,882,734	182.896.776.000	159.376.462.000	174.010.544.000
1.2.2	Dana alokasi umum	488,819,992,000	637,615,372,000	719.406.935.000	795.851.851.000	854.966.827.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	38,321,100,000	58,346,760,000	52.208.880.000	55.188.900.000	55.188.900.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	226,775,755,580	200,730,577,172	286.675.207.848	338.437.506.000	407.719.470.000
1.3.1	Hibah	2,000,000,000	0	1.076.193.701	6.426.400.000	7.390.360.000
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	53,084,159,080	66,106,734,172	74.958.695.147	59.225.259.000	102.768.119.000
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	106,558,786,500	88,545,748,000	146.439.054.000	196.228.110.000	172.305.758.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	65,132,810,000	46,078,095,000	64.201.265.000	76.557.737.000	76.557.737.000
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0
	Jumlah	1,005,232,562,979	1,147,302,763,565	1.386.155.584.659	1.517.236.814,000	1.638.708.480.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekwensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional yaitu sistem informasi manajemen keuangan dan pengelolaan aset-aset daerah. Dalam rangka meningkatkan manajemen keuangan kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan serta pertimbangan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, perlu ditekankan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan tahun 2014 yaitu :

- a. penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi;
- b. meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah;
- c. meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- d. Membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan;
- e. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
- f. Pendataan wajib pajak baru baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

Disamping itu dilakukan upaya peningkatan dana perimbangan DAU, bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, pemanfaatan sarana prasarana serta SDM guna meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta. Ke depan, kebijakan pendapatan daerah ditindak lanjuti dengan *action plan* yang rinci.

Kinerja pendapatan daerah merupakan tolok ukur keberhasilan pengelolaan pendapatan. Diasumsikan bahwa sumber pendapatan yang dominan akan mempengaruhi kinerja pendapatan. Untuk mengetahui kinerja sumber-sumber pendapatan perlu dilihat proporsinya sebagaimana tercantum pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7.
Persentase Sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Kudus

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	
		(%)	(%)	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	100,00	100,00	1.638.708.480.000	100,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	10,46	11,10	195.520.235.000	11,93
1.1.1.	Pajak Daerah	4,20	3,74	72.100.668.000	4,40
1.1.2.	Retribusi Daerah	1,12	2,32	35.256.083.000	2,15
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	0,31	0,31	5.999.220.000	3,07
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	4,83	4,72	82.164.264.000	5,01
1.2.	Dana Perimbangan	68,86	66,60	1.084.166.271.000	66,16
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1,32	10,50	174.010.544.000	10,62
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	51,90	52,45	854.966.827.000	52,17
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	3,77	3,64	55.188.900.000	3,37
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20,68	22,31	359.021.974.000	21,91
1.3.1	Hibah	0,08	0,42	7.390.360.000	0,45
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,41	3,90	102.768.119.000	6,27
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10,56	12,93	172.305.758.000	10,51
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,63	5,05	76.557.737.000	4,67
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			1.638.708.480.000	

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Pendapatan daerah tergantung pada dana perimbangan khususnya DAU dimana pada tahun 2013 proporsinya 51,90 % menjadi 52,45 % pada tahun 2014 dan menurun menjadi 52,17 % pada tahun 2015. Sedangkan proporsi PAD tahun 2013 mencapai 10,46 % meningkat menjadi 11,10 % pada tahun 2014 dan 11,93 % pada tahun 2015. Adapun proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 20,68 % dan 22,31 %, menurun menjadi 21,91% pada tahun 2015. Jadi, tingkat ketergantungan daerah semakin tinggi ditinjau dari angka proporsi sedangkan kemampuan PAD meningkat namun lamban.

Adapun capaian pengelolaan pendapatan tercermin pada realisasi pendapatan sebagaimana tertera pada tabel 3.8 berikut ini. Secara umum, kinerja pendapatan meningkat, terlihat dari realisasi yang sebelumnya tidak tercapai menjadi tercapai. Bila dilihat rinciannya, terlihat bahwa kinerja retribusi daerah menurun sedangkan pajak daerah dan bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami peningkatan. Jadi, pendapatan yang terkait pelayanan publik cenderung sulit

realisasinya karena terdapat kebijakan pembebasan biaya retribusi. Demikian pula kinerja lain-lain pendapatan yang sah yang bersumber dari hasil sewa aset pemerintah daerah maupun denda retribusi relatif menurun.

Tabel 3.8
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Kinerja ***)		
		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	PENDAPATAN	101,49	102,92	-
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	104,20	104,36	-
1.1.1.	Pajak Daerah	105,22	115,51	-
1.1.2.	Retribusi Daerah	82,63	75,64	-
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	102,86	95,85	-
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	109,88	105,44	-
1.2.	Dana Perimbangan	99,98	102,53	-
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	99,89	114,76	-
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	100,00	100,00	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	106,41	103,53	-
1.3.1	Hibah	0,00	16,38	-
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	128,49	126,57	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100,00	100,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	96,06	99,26	-

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Upaya pemerintah dalam mencapai target dilakukan melalui :

- a. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- b. Melakukan kajian terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang terkait dengan dana perimbangan ;
- d. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah; dan
- e. Efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Keuangan daerah diupayakan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari belanja wajib dan belanja pilihan.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang bersinambungan dari program-program yang akan dilaksanakan dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja, sehingga membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2015 adalah :

a. Belanja tidak langsung

Belanja pegawai diarahkan untuk :

- gaji dan tunjangan pegawai termasuk uang representasi anggota DPRD;
- Belanja Pimpinan dan anggota DPRD berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;
- Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja;
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD;
- Belanja penerimaan lainnya untuk Bupati/Wakil Bupati berupa penunjang operasional;

Belanja hibah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2015 yang diharapkan menurun dari tahun 2014.

Belanja bantuan sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial pada tahun 2015, diharapkan menurun dari tahun 2014.

Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota digunakan untuk pemenuhan kewajiban atas realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Belanja bantuan keuangan dialokasikan kepada pemerintah desa baik yang bersifat umum maupun khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Sedangkan bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja langsung

Belanja langsung diarahkan pada:

- Efisiensi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- Efektivitas, yang diprioritaskan pada program/kegiatan untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (*leverage*) atau pengaruh ganda (*multiplier effect*) yang lebih besar misalnya peningkatan infrastruktur, perluasan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan pemerintahan, serta pencapaian visi - misi Kabupaten Kudus.
- Akuntabilitas, kejelasan tolok ukur dan targetnya, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus.
- Transparansi, dimaksudkan bahwa setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan belanja diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil, dan belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung bagi SKPD. Belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Dalam RPJMD Kabupaten Kudus telah tercantum prediksi belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Kudus tahun 2015, namun dengan melihat kondisi perekonomian saat ini maka dilakukan koreksi. Rincian belanja yang mengalami peninjauan, selengkapnya tercantum pada tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9.
Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Kudus

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun 2015 (Rp)	Proyeksi RKPD tahun 2015 (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
A	Belanja Tidak Langsung	1.006.800.939.000	967.975.092.000	(38.825.847.000)	
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	890.877.763.000	852.051.916.000	(38.825.847.000)	
2.	Belanja Tambahan Penghasilan	632.655.880.000	647.376.983.000	(14.713.113.000)	
3.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	22.817.256.000	22.817.256.000	(14.102.000)	
	Penghasilan lainnya	225.662.326.000	172.305.758.000	(23.922.352.000)	
	Insentif Pemungutan Pajak	3.605.034.000	3.605.034.000		
	Insentif Pemungutan Retribusi	1.939.084.000	1.762.804.000	(176.280.000)	
4.	Belanja Bunga	70.802.000	70.802.000		
5.	Belanja Hibah	35.527.040.000	32.813.422.000	(2.713.618.000)	
6.	Belanja Bansos	23.474.000.000	26.187.618.000	2.713.618.000	
7.	Belanja Bagi Hasil	6.799.724.000	6.799.724.000		
8.	Belanja Bantuan kepada Desa *)	46.106.610.000	46.106.610.000		
9.	Belanja Bantuan Partai Politik	945.000.000	945.000.000		
10.	Belanja Tidak terduga	3.000.000.000	3.000.000.000		
B	Pengeluaran Pembiayaan	2.915.000.000	2.915.000.000		
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
2.	Pengeluaran untuk investasi	2.800.000.000	2.800.000.000		
3.	Pembayaran Pokok Utang	115.000.000	115.000.000		
	Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama	816.407.361.000	816.407.361.000		

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Berdasarkan tabel 3.9. di atas terlihat bahwa prediksi belanja tidak langsung dalam RPJMD tahun 2015 sebesar Rp.1.006.800.939.000,- sedangkan proyeksi RKPD sebesar Rp. 967.975.092.000,- sehingga terdapat selisih kurang Rp. 38.825.847.000,- . Adapun pengeluaran pembiayaan sama dengan prediksi dalam RPJMD sebesar Rp.2.915.000.000,-. Pengeluaran untuk investasi diperuntukan bagi BPD Jateng sebesar Rp.2.000.000.000,- Bank Pasar sebesar Rp.800.000.000,- dan membayar pokok hutang sebesar Rp.115.000.000,-.

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dilihat perkembangan belanja tidak langsung dan belanja langsung selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Belanja tidak langsung pada tahun 2012 meningkat Rp. 85.247.835.349,- atau meningkat 14,24 % dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan yang tinggi yaitu 18,82 % sebesar Rp. 128.727.426.222,- dan tahun 2014, prediksi pendapatan dilakukan lebih konservatif/hati-hati, namun di sisi lain perlu dipenuhi pendanaan

bagi fasilitasi kegiatan pemilu legislatif, pemilu BPD, dan pemilu presiden, maka perlu kebijakan perencanaan yang cermat.

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Pada tahun 2015 diproyeksikan pagu belanja tidak langsung sebesar Rp. 967.975.092.000,- maka terdapat peningkatan sebesar Rp. 20.161.691.000,- atau 2,12% bila dibandingkan target 2014. Adapun komposisi belanja tidak langsung tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 852.051.916.000,- atau meningkat 4,5%, belanja bunga tetap sebesar Rp. 70.802.000,-, belanja hibah sebesar Rp. 32.813.422.000,- atau menurun 28,71%, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 26.187.618.000,- atau menurun 19,10%, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 6.799.724.000,-, atau meningkat 10 %, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp. 47.051.610.000,- atau meningkat 5%, dan Belanja Tidak Terduga tetap sebesar Rp. 3.000.000.000,- .

Perkembangan belanja langsung pada tahun 2012 meningkat Rp. 116.518.498.513,- atau meningkat 33,12 % dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2013 belanja langsung meningkat sebesar Rp. 13.477.594.977,- atau 2,88 % dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2013 tidak ada Perda APBD Tahun 2013, maka menimbulkan SiLPA 2013 yang mencapai Rp. 86.131.514.000,-. Kondisi ini meningkatkan ketersediaan anggaran untuk periode 2014. Pada tahun 2015, belanja langsung diprediksikan sebesar Rp.764.629.542.000,- Namun perlu diperhatikan, bahwa terdapat kebutuhan yang perlu dipenuhi khususnya perbaikan infrastruktur, pemerataan pembangunan, maka perlu perencanaan yang cermat.

Dengan melihat prediksi belanja tidak langsung tersebut maka prediksi pengelolaan belanja tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	:	Rp. 1.638.708.480.000,-
Belanja	:	Rp. 1.732.604.634.000,-
- Tidak Langsung	:	Rp. 967.975.092.000,-
- Langsung	:	Rp. 764.629.542.000,-
Defisit	:	(Rp. 62.396.672.000)
Pembiayaan	:	
Daerah	:	
- Penerimaan	:	Rp. 34.414.482.000-
- Pengeluaran	:	Rp. (2.915.000.000,)
Pembiayaan Netto	:	Rp. 31.499.482.000,-
SILPA	:	0,-

Pada tahun 2015, dalam dokumen RPJMD belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp. 713.464.868.000,-. Berdasarkan hasil forum SKPD, usulan kabupaten mencapai Rp. 748.597.346.000,- dan setelah sinkronisasi melalui musrenbang dan mengakomodir usulan dewan maka total usulan mencapai Rp. 818.997.321.000,-. Pada tahun 2015 perkiraan pagu belanja langsung

diproyeksikan sebesar Rp.764.629.542.000,-. Pada penerimaan pembiayaan diprediksikan SiLPA sebesar Rp.34.414.482.000,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.915.000.000,- dengan peruntukan pembayaran hutang pokok sebesar Rp.115.000.000,- dan Rp.2.800.000.000,- untuk penyertaan modal. Adanya pembiayaan netto sebesar Rp.31.499.482.000,- digunakan untuk menutup defisit belanja, yang masih meninggalkan defisit anggaran sebesar Rp. 62.396.672.000,-. Mengingat keterbatasan dan kemampuan anggaran dibanding usulan, masih perlu diadakan penajaman atas kelayakan usulan kegiatan dan rasionalisasi lebih lanjut, yang akan dilaksanakan pada saat menyusun KUA/PPAS tahun 2015.

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 s.d Tahun 2015

No	Uraian	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Target Tahun 2014	Proyeksi pada Tahun 2015
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	507.984.497.549	580.192.246.240	647.389.397.621	815.347.426.000	852.051.916.000
2.1.2	Belanja bunga	70.801.380	1.054.653.530	44.378.263	70.802.000	70.802.000
2.1.3	Belanja subsidi	0	0		0	0
2.1.4	Belanja hibah	37.800.533.500	38.878.555.008	25.607.571.733	46.029.515.000	32.813.422.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	27.328.859.000	26.663.285.000	24.098.658.500	32.371.987.000	26.187.618.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.732.069.950	4.321.279.650	4.319.038.625	6.181.567.000	6.799.724.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	21.286.776.850	30.919.776.850	37.271.465.261	44.812.104.000	47.051.610.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.449.383.200	1.870.960.500	3.991.500	3.000.000.000	3.000.000.000
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	598.652.921.429	683.900.756.778	1.017.891.294.762	947.813.401.000	967.975.092.000
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	26.205.663.530	20.681.100.500	26.285.095.717	32.937.924.000	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	200.193.165.913	269.549.473.953	257.194.727.667	416.169.617.000	
2.2.3	Belanja modal	125.456.620.067	178.143.373.570	132.963.293.152	280.674.853.000	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	351.855.449.510	468.373.948.023	416.443.116.536	729.782.394.000	764.629.542.000
	TOTAL JUMLAH BELANJA	950.508.370.939	1.152.274.705.801	1.155.177.618.039	1.677.595.795.000	1.732.604.634.000

Sumber Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan SiLPA, penerimaan kembali pemberian dana talangan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Perda, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo. Dalam hal ada kecenderungan terjadi defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama tiga tahun terakhir dan proyeksi tahun 2014 dan 2015 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang pada tabel 3.11.

Penerimaan pembiayaan tahun 2015 merupakan SiLPA tahun 2014 sebesar Rp. 34.414.482.000,- sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 2.915.000.000,- untuk investasi pada BPD sebesar Rp.2.000.000.000,- investasi pada Bank Pasar sebesar Rp.800.000.000,- dan pembayaran pokok hutang sebesar Rp.115.000.000,-.

Tabel 3.11. Realisasi dan Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 s.d Tahun 2015

No	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Realisasi		Tahun 2013	Target Tahun 2014	Tahun 2015
		Tahun 2011	Tahun 2012			
1	2	3	3	4	6	7
3.1	Penerimaan pembiayaan				-	
3.1.1	Penggunaan (SILPA)	55.453.399.902	109.597.422.000	109.597.422.000	96.223.012.000	34.414.482.000
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4.	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	3.521.770.133				
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah					
3.1.7	Penerimaan dana talangan dari propinsi					
3.1.8	Penerimaan kembali pemberian dana talangan dari LUEP	1.200.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.375.000.000	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.175.170.035	112.097.422.282	112.097.422.282	98.598.012.000	34.414.482.000
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	1.680.016.000	6.519.500.000	6.519.500.000	51.482.586.000	2.800.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	113.157.736	113.157.736	113.157.736	113.157.736	115.000.000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
3.2.5	Pemberian dana talangan kepada LUEP	1.200.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	1.200.000.000	0
3.2.6	Pembayaran atas penerimaan dana talangan kepada provinsi					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.993.173.736	9.132.657.736	9.132.657.736	51.597.586.000	2.915.000.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2018 yaitu “Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera”. Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut : Semakin sejahtera mengandung makna lebih tercukupinya kebutuhan secara utuh dan menyeluruh/merata dalam arti adil, baik secara lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti cukup sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar manusia), aman tentram dan damai. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Tentram dicerminkan dari tidak adanya rasa takut dan khawatir. Damai dimaksudkan tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam sistem negara hukum.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi Pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing
6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial

RKPD tahun 2015 merupakan bagian dari tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. Berbagai potensi sumberdaya ditingkatkan pengelolaannya secara integral dan sinergis sehingga terwujud masyarakat yang semakin sejahtera.

Gambaran yang menunjukkan korelasi misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dijadikan koridor dalam kristalisasi strategi penentuan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target dan satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD ke dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015.

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN dan pencapaian sasaran prioritas pembangunan telah dijabarkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah, sebagaimana telah diuraikan di dalam Bab IV, diupayakan melalui pelaksanaan indikasi rencana program sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Program prioritas dimaksudkan untuk mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera sebagaimana tercantum dalam visi Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. Selain itu, dalam rangka mengakomodasi perubahan aturan, dinamika kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik serta memperhatikan tahap kedua dalam RPJPD Kabupaten Kudus. Berikut ini merupakan penjabaran berbagai pertimbangan ke dalam program prioritas daerah dan program pendukung secara lengkap :

Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan peran UMKM dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM. Meningkatnya akses pasar produk UMKM.
2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas Tertatanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat <p>Meningkatnya keluarga kecil sejahtera dan berkualitas</p>
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.	Pengembangan kesempatan kerja/berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan sektor industri. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Meningkatnya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja

Misi	Tujuan	Sasaran
5. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing	1. Peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah	1. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata 2. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan
	2. Peningkatan peran sektor pertanian	Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian
6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	1. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan 2. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
	2. Perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan	1. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup 2. Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan persampahan 3. Meningkatnya kapasitas pengelolaan lingkungan
	3. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis
	4. Perwujudan tertib pertanahan	Meningkatnya pengelolaan pertanahan
7. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur 3. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 4. Meningkatnya kinerja SDM legislatif

Misi	Tujuan	Sasaran
	2. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah
	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi 3. Meningkatnya pelayanan bidang ketransmigrasian 4. Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah 5. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah
	4. Perwujudan ketertiban sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Terwujudnya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat 3. Meningkatnya kualitas penanganan bencana
	1. Perwujudan nilai-nilai kehidupan beragama di masyarakat	Meningkatnya nilai-nilai kehidupan beragama
8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial	2. Peningkatan pelestarian seni dan budaya daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah 2. Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya
	3. Pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan 2. Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba
	4. Perwujudan pembangunan yang berkeadilan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 2. Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak

Misi	Tujuan	Sasaran
	5. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial	1. Meningkatnya percepatan pertumbuhan pembangunan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa 2. Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa

4.2. Prioritas Pembangunan

Pengertian Prioritas pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.
- b. program unggulan SKPD (terpilih) yang tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan
- c. merupakan agenda pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara (*milestone*) menuju sasaran 5 tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui rencana program pembangunan tahunan daerah;
- d. Merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah dan hasil perumusan teknokratis terkait yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan perlu dijaga kesinambungannya. Tidak semua program dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, mengingat keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program pembangunan merupakan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, yang dijabarkan pada setiap misi sebagai berikut :

Misi 1 : Pemberdayaan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; dan
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Misi 2 : Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas
Urusan Pendidikan :

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- b. Program Pendidikan Menengah;
- c. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Program Pendidikan Non Formal; dan
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Misi 3 : Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.

1. Urusan Kesehatan :
 - a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana; Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
 - d. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
 - e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 - g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
 - h. Program Pelayanan Kesehatan BLUD;
 - i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - j. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
 - k. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; dan
 - l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
2. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera :
 - a. Program Keluarga Berencana;
 - b. Program Pelayanan Kontrasepsi; dan
 - c. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

Misi 4 : Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

1. Urusan Industri :
 - a. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah;
 - b. Program Penataan Struktur Industri;
 - c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
2. Urusan Ketenagakerjaan :
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
 - c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

3. Urusan Penanaman Modal :
 - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Misi 5 : Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing.

1. Urusan Ketahanan Pangan :
Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Urusan Pertanian :
 - a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 - b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
 - c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
 - d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; dan
 - e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
3. Urusan Kehutanan :
 - a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; dan
 - b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
4. Urusan Pariwisata :
 - a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
5. Urusan Kelautan dan Perikanan :
Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
6. Urusan Perdagangan :
 - a. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
 - b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ;
 - c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
 - d. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan; dan
 - e. Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Misi 6 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

1. Urusan Pekerjaan Umum :
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
 - d. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan
 - e. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.
2. Urusan Perumahan :
Program Pengembangan Perumahan.
3. Urusan Penataan Ruang :
 - a. Program Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

4. Urusan Perhubungan :
 - a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
 - c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
 - d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
5. Urusan Lingkungan Hidup :
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
 - e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
6. Urusan Pertanahan :

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
7. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral :

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

Misi 7 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*).

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian :
 - a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 - c. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
 - d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - h. Program pembinaan dan pengembangan Aparatur;
 - i. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - j. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; dan
 - k. Program penataan peraturan Perundang-undangan.
2. Urusan Perencanaan Pembangunan :
 - a. Program Pengembangan Data/Informasi;
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - d. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan

- f. Program pengembangan dan penelitian daerah.
3. Urusan Statistik :
Program pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah.
4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil :
Program Penataan Administrasi Kependudukan.
5. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; dan
 - b. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media.
6. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
 - a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
 - d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; dan
 - e. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana.
7. Urusan Kearsipan
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.
8. Urusan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
9. Urusan Ketransmigrasian
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Misi 8 : Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

1. Urusan Kebudayaan :
 - a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
 - b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
 - c. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
 - d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
2. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga :
 - a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - c. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; dan
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
4. Urusan Sosial :
 - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;

- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Program peningkatan pelayanan pengelolaan toleransi beragama;
 - d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
 - e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
 - f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya); dan
 - g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
5. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :
- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
 - b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
 - c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; dan
 - d. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB VI

PENUTUP

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2015 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Kudus, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di samping hal tersebut RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2015 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya.

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A